

**MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN DI
MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL HIKMAH
MENGANTI KEDUNG JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam



Oleh:

ANIS KHUMAIDAH
NIM: 1503036007

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Khumaidah
NIM : 1503036007
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Program Studi : S1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN DI MADRASAH
IBTIDAIYAH DARUL HIKMAH MENGANTI KEDUNG
JEPARA**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 16 Maret 2020

Pembuat Pernyataan,



Anis Khumaidah

NIM : 1503036007



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan Semarang
Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan:

Judul : **Manajemen Keuangan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara**

Nama : Anis Khumaidah

NIM : 1503036007

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Program Studi : S1

telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* oleh dewan penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam.

Semarang, 24 Maret 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua

Agus Khunaifi, M.Ag
NIP: 19760226 200501 1 004

Penguji I

Dr. Fatkuroji, M.Pd
NIP: 19770415 200701 1 032

Pembimbing I

Dr. Fahrurrozi, M.Ag
NIP: 19770816 200501 1 003

Sekretaris

M. Rikza, S.Pd.I., M.Si
19800320 200710 1 001

Penguji II

Dr. Abdul Wahid, M.Ag.
NIP: 19691114 199403 1 003

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag.
NIP: 19681212 199403 1 003



NOTA DINAS

Semarang, 16 Maret 2020

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Manajemen Keuangan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara**
Nama : Anis Khumaidah
NIM : 1503036007
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Program Studi : S1

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I,



Dr. Fahrurrozi, M. Ag
NIP. 19770816 200501 1 003

NOTA DINAS

Semarang, 16 Maret 2020

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Manajemen Keuangan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara**

Nama : Anis Khumaidah

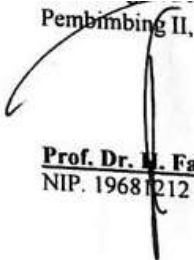
NIM : 1503036007

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Munaqosyah.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M. Ag
NIP. 19681212 199403 1 003

ABSTRAK

Judul : **MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL HIKMAH MENGANTI KEDUNG JEPARA**

Penulis : Anis Khumaidah

NIM : 1503036007

Manajemen keuangan pendidikan menjadi salah satu hal vital dalam pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana perencanaan keuangan pendidikan, 2) bagaimana pelaksanaan keuangan pendidikan, 3) bagaimana evaluasi keuangan pendidikan MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan dalam proses analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) perencanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah dimulai dari penyusunan anggaran, yaitu identifikasi dan analisis kebutuhan oleh *stakeholder*. Identifikasi sumber, yaitu dari BOS dan SPP kelas *Tahfizh*. Lalu, dikembangkan dan diajukan kepada pihak madrasah dan yayasan untuk disahkan, 2) pelaksanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah berupa penerimaan, yaitu setiap dana yang diterima, dicatat lalu direkap oleh bendahara, dan sesuai dengan prosedur penerimaan dan pembukuan. Pengeluaran, dicatat dalam buku catatan pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan alokasi pengeluaran untuk biaya rutin maupun non rutin madrasah, 3) evaluasi keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah dilakukan oleh pihak internal (kepala madrasah, yayasan Darul Hikmah) dan eksternal (Kemenag Kabupaten Jepara) dengan mengawasi dan melihat bukti laporan rincian pendapatan dan pengeluaran, dilaksanakan satu bulan sekali (laporan bulanan), satu tahun sekali (laporan pertanggungjawaban tahunan) dan satu semester sekali (laporan pertanggungjawaban dana BOS).

Saran daripada penelitian yang telah dilakukan adalah 1) dalam perencanaan keuangan sebaiknya melibatkan peran aktif orangtua dan masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam menentukan kebijakan untuk pembiayaan madrasah, 2) pelaksanaan keuangan

terkait dengan sumber pendapatan keuangan madrasah bisa lebih variatif dari berbagai sumber. Madrasah dapat memaksimalkan sumber dana lain, bisa dengan membentuk wirausaha madrasah, bazar, sumbangan dari orang tua siswa yaang tidak terikat dan jenis lainnya, 3) evaluasi sudah sesuai antara pemberi dana dan pertanggungjawabannya, hanya saja lebih ditingkatkan kembali dan pihak evaluator selalu memberikan saran ketika pengawasan.

Kata Kunci : *Manajemen Keuangan Pendidikan, Biaya Pendidikan*

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أُو

ai = أَي

iy = اِي

MOTTO

“Manajemen Keuangan Pendidikan Merupakan Urat Nadi dalam Sebuah Lembaga Pendidikan demi Berlangsungnya pendidikan itu sendiri.”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberi petunjuk, rahmat, hidayah, kemurahan serta kemudahan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul terakhir yang membawa risalah Islamiyah, penyejuk dan bahagia dunia akhirat, serta pemberi syafaat kelak di yaumul qiyamat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. Dalam rangka itu penulis membuat skripsi ini dengan judul “Manajemen Keuangan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara”. Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan, baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Lift Anis Ma'shumah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Dr. Fatkuroji, M.Pd, dan Sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Agus Khunaifi, M.Ag.

4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Fahrurrozi, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran, serta motivasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak Dul Karim, S. Pd. I., selaku kepala MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara beserta pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memberikan izin penelitian dan telah berkenan memberikan waktu luang serta informasi kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.
7. Orangtua penulis, Bapak Mahmudi dan Ibu Siti Amdayana, serta Adik penulis, Ahmad Yusuf Mahmud yang selalu ada disetiap kemudahan dan kesulitan, yang selalu mengalirkan doa, nasihat dan motivasi kepada penulis. Semoga penulis diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan mereka.
8. Keluarga Kos Bu Yanti's *Squad*, Ma'had *al-Jami'ah* UIN Walisongo Angkatan ke-6, teman-teman seperjuangan MPI 2015, khususnya MPI A, KKL Sekretariat Daerah Jepara 2017, PPL SMPIT Robbani Kendal 2018, serta tim KKN MIT ke-VII Kelurahan Karanganyar 2019 yang telah memberi hikmah dan kebersamaan perjalanan semasa kuliah di UIN Walisongo Semarang.

9. Semua pihak serta teman-teman yang belum tercantum, yang telah memberikan dukungan, saran, arahan, dan bantuan kepada penulis sampai dengan selesainya penyusunan skripsi ini.

Tidak ada ucapan dari penulis selain *Jazakumullah Khairan Katsiran*. Mudah-mudahan amal dan jasa baik mereka diterima, diridhoi dan dibalas kebaikan berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dalam skripsi ini. Semoga yang terkandung dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 16 Maret 2020

Penulis,

Anis Khumaidah

NIM: 1503036007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DARTAR TABEL	xv
DARTAR GAMBAR	xvi
DARTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II : MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN	
A. Deskripsi Teori	9
1. Manajemen Keuangan Pendidikan	9

a. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan.....	9
b. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan	15
c. Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan Pendidikan.....	18
2. Biaya Pendidikan	39
a. Pengertian Biaya Pendidikan	39
b. Jenis-Jenis Biaya Pendidikan	42
c. Sumber-Sumber Biaya Pendidikan	45
B. Kajian Pustaka Relevan	49
C. Kerangka Berpikir.....	54

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Tempat dan Waktu Penelitian	57
C. Sumber Data.....	57
D. Fokus Penelitian	59
E. Teknik Pengumpulan Data	59
F. Uji Keabsahan Data.....	62
G. Teknik Analisis Data	63

BAB IV : DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	66
1. Profil MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara	66
a. Sejarah Singkat MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara	66
b. Visi dan Misi MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara	67

c. Keadaan Guru, Tenaga Kependidikan dan Siswa di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara	69
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian	71
1. Perencanaan Keuangan Pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.....	71
2. Pelaksanaan Keuangan Pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara	77
3. Evaluasi Keuangan Pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara	84
C. Analisis Data	87
D. Keterbatasan Penelitian	92

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
C. Penutup.....	96

DAFTAR PUSTAKA	97
----------------------	----

LAMPIRAN	101
----------------	-----

RIWAYAT HIDUP	125
---------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	69
Tabel 4.2 Jumlah Peserta Didik	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir	55
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	101
Lampiran 2 Dokumentasi	110
Lampiran 3 Surat Izin Riset	123
Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Riset.....	124
Riwayat Hidup	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pendidikan diukur dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek keuangan atau pembiayaan pendidikan. Pendidikan tidak lepas dari kebutuhan keuangan untuk mendukung terselenggaranya program pendidikan secara efektif dan efisien. Keuangan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sumber dana merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan.¹

Hal tersebut lebih terasa di era sekarang ini, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan sesuai ketentuan yang ada. Keuangan atau dana pendidikan tersebut sangat menentukan ketercapaian tujuan sekolah dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, sehingga dana tersebut perlu dikelola dengan baik secara efektif dan efisien dan berfokus pada tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan dibiayai pemerintah, kemudian pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan

¹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 167.

nasional, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama. Negara juga harus mengalokasikan sekurang-kurangnya anggaran 20% dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.² Diketahui bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari APBN serta APBD untuk pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah maupun madrasah di Indonesia. Anggaran tersebut seyogyanya bisa dikelola dengan baik oleh sekolah sehingga kebutuhan akan pendidikan dapat terpenuhi dan kualitas serta mutu pendidikan bisa sesuai dengan ketentuan.

Di era sekarang ini implementasi dalam manajemen sekolah komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggung jawaban agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran serta bebas dari korupsi. Di sinilah peran penting sebuah lembaga pendidikan untuk bisa mengelola pembiayaannya dengan baik agar dana yang dipunyai dapat dimaksimalkan untuk peningkatan mutu pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan.

Namun pada praktiknya masih banyak sekolah maupun madrasah yang belum secara efektif dan efisien mengelola keuangan pendidikan sesuai dengan prinsip dan pengelolaan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang terjadi di dalam lembaga terkait dengan manajemen keuangan pendidikan diantaranya sumber dana

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.

yang terbatas, pembiayaan program yang serampangan, tidak mendukung visi, misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis didalam rencana strategis lembaga pendidikan.³ Permasalahan dana atau keuangan pendidikan menjadi salah satunya. Tidak semua lembaga pendidikan bisa mengelola keuangan atau dana pendidikan dengan baik, karena sejatinya uang yang dikelola harus disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan standar mutu pendidikan.

Selain di atas, dalam praktiknya, seperti yang dikatakan oleh Fahrurrozi dalam penelitiannya bahwa pengelolaan pendanaan pendidikan di kota Semarang, seperti penggalangan dana yang dilakukan oleh kebanyakan sekolah/ madrasah masih didominasi dari sumbangan orang tua/ wali peserta didik, belum banyak mobilisasi atas sumber lain di luar orang tua siswa. Oleh karena keterbatasan kemampuan orang tua/wali murid dalam membiayai sekolah anaknya, maka kegiatan sekolah disesuaikan dengan dana yang tersedia. Sebagai respon atas fenomena tersebut, masyarakat menyoroti pemanfaatan dana yang dikaitkan dengan mutu pendidikan yang dicapai.⁴

Realitanya, dalam hal biaya pendidikan sampai saat ini dirasakan semakin mahal. Terlebih lagi, dari kalangan kurang mampu semakin tidak menentu kondisi perekonomiannya dari hari ke hari. Apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap

³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 256.

⁴ Fahrurrozi, "Manajemen Keuangan Madrasah", *Jurnal Walisongo*, (Vol. 17, No. 2, tahun 2012), hlm. 224.

dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau disebabkan oleh hal yang lainnya. Di jenjang pendidikan dasar, sekalipun Pemerintah telah memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD dan SMP negeri, namun dianggap oleh sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orangtua/wali peserta didik.⁵

Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah, karena seluruh komponen pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran.⁶ Dari beberapa permasalahan yang terjadi di atas dapat diketahui bahwa salah satu masalah dalam ketercapaian tujuan dan mutu pendidikan adalah pengelolaan keuangan dalam pendidikan.

Upaya pemerintah untuk memberi ruang atas masalah tersebut adalah melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa “pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”.⁷ Lebih lanjut, pasal 2 ayat (1)

⁵ Ferdi W. P., “Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, (Vol. 19, No. 4, tahun 2013), hlm. 566.

⁶ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 193.

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 46, ayat (1).

dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud meliputi; penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan pihak lain selain yang dimaksud yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.⁸

Berdasarkan peraturan tersebut maka keberlangsungan pendidikan di sekolah/ madrasah perlu adanya sumber keuangan yang memadai dan keuangan pendidikan dikelola dengan efektif dan efisien agar proses belajar mengajar, sarana dan prasarana tersedia dengan baik, permasalahan yang menjadi kendala dalam kegiatan belajar mengajar dan berbagai kebutuhan pendidikan bisa terpenuhi, sehingga mutu dan kualitas pendidikan menjadi baik.

Meski tidak sepenuhnya tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas madrasah, masih ada madrasah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan. Dalam hal ini, meskipun yang diinginkan adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup. Maka dari itu betapa pentingnya pengelolaan keuangan pendidikan agar bisa mencapai tujuan dan peningkatan mutu pendidikan secara efektif dan efisien.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018, *Pendanaan Pendidikan*, ayat (1) dan (2).

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara sebagai salah satu madrasah yang berada di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara dengan program-program yang dimiliki, sehingga MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, salah satunya adalah diperlukan suatu pengelolaan keuangan melalui sebuah manajemen yang baik untuk menyelenggarakan pendidikan dan bagaimana sekolah mengelola dana yang dimiliki untuk meningkatkan mutu pendidikan. Melihat pentingnya manajemen keuangan pada lembaga pendidikan tersebut, penulis merumuskan judul “Manajemen Keuangan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang hendak dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara?
2. Bagaimana pelaksanaan keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara?
3. Bagaimana evaluasi keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan bermanfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu Manajemen Pendidikan Islam, melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan dalam memperkaya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Hikmah Menganti Kedung, khususnya bagi mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan umumnya bagi seluruh mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
 - b. Memberikan sumbangan serta masukan bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khususnya pada pengelolaan keuangan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian Agama, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi pengambilan kebijakan pendidikan, khususnya kebijakan dalam keuangan pendidikan.
- b. Bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keustakaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai bahan masukan dalam menambah informasi pengetahuan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keuangan pendidikan.
- d. Bagi Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang akan ditentukan mengenai manajemen keuangan pendidikan.
- e. Bagi *Stakeholder*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai pengelolaan keuangan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.
- f. Bagi peneliti lainnya, adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan pengelolaan keuangan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

BAB II

MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen Keuangan Pendidikan

a. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan

Istilah manajemen dalam bahasa Indonesia masih belum ada keseragaman. Berbagai istilah yang dipergunakan diantaranya yaitu ketatalaksanaan, manajemen, pengurusan dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pengelolaan. Manajemen secara umum mengandung tiga pengertian yaitu *pertama*, manajemen sebagai suatu proses, *kedua*, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan *ketiga*, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.⁹

Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti tangan, dalam bahasa Italia *maneggiare* berarti mengendalikan, bahasa Perancis *management* berarti seni melaksanakan dan mengatur, sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur.¹⁰ Manajemen atau pengelolaan adalah hal yang dilakukan oleh para manajer.

⁹ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 3.

¹⁰ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1.

Manajemen melibatkan aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.¹¹

Para ahli mendefinisikan manajemen sebagai berikut:

- 1) Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
- 2) Andrew F. Sikula, manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.
- 3) Stephen P. Robbins mendefinisikan manajemen adalah suatu proses melakukan koordinasi dan integrasi-integrasi kegiatan kerja agar disesuaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain.

¹¹ Stephen P. Robbin, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 5.

- 4) Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
- 5) James A. F. Toner menjelaskan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹²

Dari beberapa definisi manajemen di atas maka manajemen merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi maupun perorangan, didalamnya terdapat proses perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan, pemotivasian, komunikasi dan evaluasi secara efektif dan efisien.

Pendidikan erat kaitannya dengan kegiatan manajemen keuangan. Manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan merupakan salah satu substansi dari manajemen sekolah. Menurut Depdiknas bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan,

¹² Effendi, *Asas Manajemen...*, hlm. 3-4.

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.¹³

Menurut Ogbonnaya, keuangan pendidikan adalah:

“education finance as the process by which tax revenues and other resources are derived for the establishment and operation of educational institutions as well as the process by which these resources are allocated to institutions in different geographical areas”.¹⁴

Ogbonnaya menjelaskan bahwa keuangan pendidikan sebagai sebuah proses dimana pendapatan pajak dan sumber daya lain yang diperoleh bagi pembentukan dan pengoperasian institusi pendidikan sama pentingnya dengan proses mengalokasikan sumber daya tersebut ke instansi di berbagai wilayah.

Suad Husnan mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana.¹⁵

¹³ Muhamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) hlm. 8.

¹⁴ Nelson Ogbonnaya dkk, *Budgeting and Financial Management in Education*, (Lagos: Noun Press, 2017), hlm. 10.

¹⁵ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 256.

Sejalan dengan Husnan, Fahrurrozi juga berpendapat bahwa manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan pendidikan. Jika ekonomi berfokus pada alokasi dan pembiayaan berfokus pada distribusi, maka pengelolaan biaya berfokus pada fungsi-fungsi manajemen.¹⁶

Sementara itu, Clarke mengemukakan bahwa:

*“financial management as follows: It is essential that the (school) principal makes sure that she/ he has the knowledge and understanding of the basic processes involved in managing the school's accounts, the budgeting process and the systems and controls that are necessary to ensure that the school's monies are not misappropriated”.*¹⁷

Clarke menjelaskan bahwa manajemen keuangan sangat penting. Bahwasanya sumber daya manusia di sekolah dipastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang proses-proses dasar dari manajemen keuangan itu sendiri dalam mengelola rekening sekolah, proses penganggaran dan sistem serta kontrol yang diperlukan untuk memastikan bahwa uang sekolah tidak salah.

Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan,

¹⁶ Fahrurrozi, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 142.

¹⁷ Leslie Swartz, *Financial Management of Schools*, (Texas: Connexions, 2009), hlm. 4.

pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Keuangan pendidikan bersumber dari pemerintah dan nonpemerintah. Keuangan yang bersumber dari pemerintah berupa uang rutin dan uang pembangunan, sedangkan keuangan yang bersumber dari nonpemerintah berasal dari SPP dan sumbangan dari orang tua serta masyarakat.

Manajemen keuangan pendidikan menyangkut dua hal, yaitu bagaimana memperoleh dana serta bagaimana menggunakan atau mengalokasikan dana dalam lingkungan yang berbeda dengan tingkat pendidikan yang berbeda pula dengan efektif dan efisien. Sumber dana sekolah diperoleh dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin dan biaya operasional, dan dana dari masyarakat, baik dari orang tua siswa maupun kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, manajemen keuangan pendidikan menyangkut fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pencarian dan pengendalian keuangan.

Dengan demikian, pengertian manajemen keuangan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan pendidikan dengan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah serta bagaimana

memperoleh sumber dan dan menggunakan sumber dana tersebut sesuai dengan kebutuhan.

b. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.¹⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan dinyatakan pada ayat (1) pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, dan ayat (2) ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹ Berikut penjelasannya:

1) Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan *stakeholder* melalui penyediaan

¹⁸ UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48.

¹⁹ Connie Chairunnisa, *Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 50-51.

informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti uang yang telah digunakan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada *stakeholders* yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas.

3) Efektivitas

Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangannya dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4) Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu

dilihat dari segi waktu dan biaya. Kegiatan dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Kemudian dilihat dari segi hasil. Kegiatan dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.²⁰

- 5) Selain itu, secara tertib berarti dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan sekolah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Manfaat untuk masyarakat sekolah adalah bahwa keuangan sekolah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sekolah.²¹ Menurut Mintarsih, apabila pengelolaan berjalan baik serta akuntabel maka akan menimbulkan berbagai manfaat, diantaranya²²:

- 1) Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dan efektif.

²⁰ Manahan Tampubolon, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan (Education and Finance Plan)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 190.

²¹ Muhamad, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 164-165.

²² Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan...*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 302.

- 2) Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut.
- 3) Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran ataupun penyimpangan-penyimpangan dana dari rencana semula. Penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan baik sesuai yang diharapkan.

c. Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan Pendidikan

Fungsi-fungsi manajemen menurut pendekatan dari sudut pandang fungsi, seorang manajer menjalankan fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas tertentu dalam rangka mengelola pekerjaan orang lain secara efisien dan efektif. Henri Fayol, menyebutkan ada lima fungsi yang dilakukan oleh seorang manajer secara umum, yaitu perencanaan (*planning*), penataan (*organizing*), penugasan (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), dan pengendalian (*controlling*).²³

Tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah (2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah dan (3) meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

²³ Robbin, *Manajemen...*, hlm. 9.

Fungsi-fungsi manajemen keuangan secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
- 2) Penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
- 3) Pengelolaan keuangan, menggunakan dana sekolah untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
- 4) Pencarian keuangan, mengumpulkan dana sekolah serta menyimpan dan mengamalkan dana tersebut.
- 5) Pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada sekolah.
- 6) Pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan sekolah yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
- 7) Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan sekolah sekaligus bahan evaluasi.²⁴

Kemudian dalam manajemen keuangan pendidikan, fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan Keuangan Pendidikan

Jones mengungkapkan bahwa *financial planning is called budgeting*, yaitu kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa terjadi efek samping yang merugikan.²⁵ Penganggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget

²⁴ Muhamad, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 168.

²⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah...*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 171.

merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.²⁶ Perencanaan keuangan sekolah mencakup dua kegiatan, yaitu penyusunan anggaran dan pengembangan rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS).

Terkait pentingnya perencanaan, dalam hal ini adalah *budgeting* atau penganggaran ayat yang berkaitan, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. al-Hasyr/ 59: 18).²⁷

Tafsir ayat delapan belas dari surat al-Hasyr tersebut adalah:

Kepada orang-orang beriman diperintahkan agar bertaqwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-

²⁶ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 47.

²⁷ Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya'ban Al-Hafizh (Ed.), *An-Nisa': Al-Qur'an for Ladies & Fiqih Wanita*, (Bekasi: Surprise Production, 2012), hlm. 548.

perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Termasuk melaksanakan perintah Allah ialah memurnikan ketaatan dan menundukkan diri hanya kepada-Nya, tidak ada satupun unsur syirik di dalamnya, melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan, dan mengadakan hubungan baik dengan sesama manusia.

Kemudian orang-orang bertaqwa hendaklah selalu memperhatikan dan meneliti apa yang akan dikerjakan, apakah ada manfaat untuk dirinya di akhirat nanti atau tidak. Di samping itu hendaklah seseorang selalu memperhitungkan perbuatannya sendiri, apakah sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Jika lebih banyak dikerjakan yang dilarang Allah, hendaklah ia berusaha menutupnya dengan amal-amal saleh.²⁸ Dengan kata lain, ayat di atas memerintahkan manusia agar selalu mawas diri, memperhitungkan segala yang akan dan telah diperbuat sebelum Allah menghitungnya di akhirat kelak.

Pertama, penyusunan anggaran keuangan sekolah. Fungsi yang pertama ini meliputi dari mana saja sumber pendapat keuangan didapat, pengeluaran anggaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010) hlm. 74-75.

sarana prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium, dan kesejahteraan.²⁹

Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan.³⁰ Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, Lipham mengungkapkan empat fase kegiatan pokok sebagai berikut:

- a) Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
- b) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas.

²⁹ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 198-200.

³⁰ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah...*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 171.

- c) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- d) Menilai pelaksanaan anggaran, yaitu menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana sasaran program, serta memuat rekomendasi untuk perbaikan yang akan datang.

Proses penyusunan anggaran, setidaknya harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
- b) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang.
- c) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
- d) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
- e) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
- f) Melakukan revisi usulan anggaran.

- g) Persetujuan revisi usulan anggaran.
- h) Pengesahan anggaran.³¹

Dalam penganggaran ini, setiap sekolah seyogyanya memiliki rencana strategis untuk periode waktu tertentu yang didalamnya mencakup visi, misi, dan program, serta sasaran tahunan.³²

Kedua, pengembangan rencana anggaran belanja sekolah (RAPBS). Kegiatan ini ada beberapa langkah, yaitu:

- a) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan
- b) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya
- c) Menentukan program kerja dan rincian program
- d) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
- e) Menghitung dana yang dibutuhkan
- f) Menentukan sumber dan untuk membiayai rencana

Rencana tersebut setelah dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka selanjutnya ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Pada setiap anggaran yang disusun perlu dijelaskan apakah rencana anggaran yang akan dilaksanakan merupakan hal

³¹ Arie Wibowo Kurniawan, dkk, *Manajemen Keuangan SMK*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud, tt), hlm. 73.

³² Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 269.

yang baru atau kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya dengan menyebut sumber dana sebelumnya.³³

Hal ini senada dengan pendapat bahwa “*The financial plan has to comprise all planned revenue and expenditure of indirect users that will be paid to schools in the next calendar year*”.³⁴ Rencana keuangan harus mencakup semua pendapatan dan pengeluaran kebutuhan tidak langsung yang direncanakan yang akan dibayarkan ke sekolah-sekolah dalam tahun berikutnya.

Tatjana Hovart menjelaskan bahwa:

*A budget guides the financial management practices of educational administrators, be it in the primary, secondary or tertiary levels of education. Secondly, a budget prevents waste or reckless spending of funds provided for various educational services. The reason is because its implementers are tied to or compelled to follow the approved estimates in expending funds. Thirdly, a budget attracts the interest and support of tax payers.*³⁵

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa pentingnya *budget* adalah yang pertama, untuk mengontrol tingkah laku administrator dalam sistem

³³ Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*. (Jakarta: RajawaPers, 2014), hlm.191-192.

³⁴ Tatjana Hovart, “Leader Accountability for School Financial Management” (*Annual World [International Congress for Effectiveness and Improvement] ICSEI*), hlm. 154.

³⁵ Nelson Obgonnaya dkk, *Budgeting and Financial...*, (Lagos: Noun Press, 2017), hlm. 45.

sekolah. Kedua, anggaran atau *budget* mencegah pemborosan dana. Ketiga, anggaran menarik minat para pembayar pajak, dalam hal ini pemberi dana bagi sekolah atau madrasah untuk menhatahui kejelasan dana yang telah diberikan dipergunakan untuk apa saja.

Selain sebagai alat perencanaan dan pengendalian, anggaran juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi kuat atau lemah.³⁶ Adanya perencanaan keuangan sekolah sebagai acuan langkah awal dalam menyusun kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan sekolah atau madrasah.

Berkaitan dengan waktu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ainul Mardiyah Usman dan kawan-kawan di SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh, RAPBS dilakukan secara rutin tiap tahun ajaran atau awal semester oleh kepala sekolah, guru, bendahara, dan komite sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan anggaran.³⁷

³⁶ Nanang Fattah, *Ekonomi*...., hlm. 49.

³⁷ Ainul Mardiyah Usman, dkk, "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh", *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, (Vol. 5, no. 4, tahun 2017), hlm. 238.

Kemudian, dalam penyusunan RAPBS seperti yang dilakukan oleh Fahrurrozi dalam penelitiannya harus ada akuntabilitas penyusunan RAPBS yang diketahui dalam beberapa faktor, yaitu 1) penyusunan RAPBS dilakukan oleh tim, 2) rapat tim dihadiri oleh semua unsur, 3) penyusunan RAPBS didasarkan pada analisis kebutuhan, 4) penentuan skala prioritas yang berorientasi pada mutu, 5) sumber dana yang variatif, 6) alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan.³⁸

2) Pelaksanaan Keuangan Pendidikan

Jones juga mengatakan bahwa *implementation involves accounting* atau pelaksanaan anggaran adalah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.³⁹ Secara umum dalam pelaksanaan keuangan disebut juga akunting. Pelaksanaan keuangan sekolah dalam garis besarnya yaitu penerimaan dan pengeluaran.

Pertama, penerimaan. Penerimaan keuangan sekolah yang berasal dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur-prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketepatan yang disepakati.⁴⁰ Berhubungan dengan

³⁸ Fahrurrozi, "Manajemen Keuangan Madrasah", *Jurnal Walisongo*, (Vol. 17, No. 2, tahun 2012), hlm. 232.

³⁹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah...*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 171,

⁴⁰ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah...*, hlm. 201-202.

penerimaan, ada beberapa hal yang dilakukan dalam penatausahaan penerimaan keuangan sekolah, yaitu:

- a) Bendahara sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Bendahara sekolah wajib menutup buku kas umum sertiap akhir bulan dan diketahui oleh kepala sekolah.
- c) Semua penerimaan harus dicatat dalam buku kas umum.
- d) Selain dicatat pada kas umum, semua penerimaan dicatat dalam buku bantu penerimaan sesuai dengan jenis sumber dayanya.
- e) Penyetoran dicatat dalam buku bantu bank.
- f) Bendahara sekolah wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan mempertanggungjawabkan kepada kepala sekolah.⁴¹

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008, sumber pendanaan bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Disamping itu, dapat diperoleh dari sumber lain dari pihak masyarakat dalam bentuk kerjasama saling menguntungkan.

Selanjutnya, pengeluaran. Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah

⁴¹ Muhamad, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 194.

untuk pembelian beberapa sumber atau input dari proses sekolah. Berkaitan dengan pengeluaran, ada beberapa hal yang dilakukan dalam penatausahaan pengeluaran keuangan sekolah, yaitu⁴²:

- a) Bendahara sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran atau penggunaann dana yang menjadi tanggungjawabnya.
- b) Semua pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum.
- c) Selain dicatat pada buku kas umum, semua pengeluaran dicatat dalam buku bantu pengeluaran sesuai dengan jenis kegiatan.
- d) Bendahara sekolah wajib memperrtanggungjawabkan atas penerimaan dan pengeluaran dana yang menjadi tanggungjawabnya kepada kepala sekolah.
- e) Dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana, bendahara sekolah menggunakan buku kas umum dan laporan realisasi penggunaan dana.

Selain di atas, Matin mengatakan bahwa penatausahaan keuangan dalam pendidikan merupakan kegiatan pencatatan transaksi keluar masuknya uang yang digunakan untuk membiayai pendidikan. Kegiatan tersebut mencakup dua kegiatan penting, yaitu pendataan

⁴² Muhamad, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 194.

dan pelaporan keuangan pendidikan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan.⁴³

- a) Pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan pendidikan. Kegiatan ini meliputi identifikasi dan pengukuran data keuangan, pencatatan dan pengklasifikasian data keuangan, dan pelaporan data keuangan kepada pihak pengguna.
- b) Pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan. Kegiatan ini berkaitan dengan pelaksanaan teknis akuntansi yaitu melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi-transaksi keuangan pada suatu unit kerja. Buku-buku yang dipakai untuk mencatat transaksi keuangan pendidikan secara garis besar dibagi dua, yaitu buku kas umum skontro (buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai, buku pengawas UYHD, buku pembantu pengawas kredit perMAK, dan buku pembantu lainnya) dan buku kas umum tabelaris.

3) Evaluasi Keuangan Pendidikan

Evaluasi keuangan menurut Jones adalah proses penilaian terhadap pencapaian tujuan.⁴⁴ Evaluasi merupakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah

⁴³ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 137-152.

⁴⁴ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah...*, hlm. 171.

ditetapkan. Ayat yang berkaitan dengan evaluasi keuangan yaitu:

﴿ أَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾
﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ﴾

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu (Q.s. al-Syu'araa'/ 26: 181-184).⁴⁵

Ayat 181-184 berkaitan dengan nabi Syuaib yang yang menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang biasa dilakukan, diantaranya mengurangi timbangan, menurunkan harga barang agar mereka dapat membeli barang tersebut dengan sangat rendah, dan membuat kerusakan dan keonaran di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih

⁴⁵ Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya'ban Al-Hafizh (Ed.), *An-Nisa': Al-Qur'an for Ladies...*, hlm. 374-375.

baik bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan yang baik.⁴⁶

Selain itu terdapat dalam al-Isra': 35 yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. al-Isra'/ 17: 35).⁴⁷

Dalam surat al-Isra' ayat 35 ini, Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang dagangan. Maksudnya ialah pada waktu menakar barang hendaknya dilakukan dengan setepat-tepatnya dan secermat-cermatnya. Demikian pula seseorang menakar barang dagangan orang lain yang akan ia terima sesudah dibeli, tidak boleh dilebihkan karena juga merugikan orang lain.

Allah juga memerintahkan agar menimbang barang dengan neraca (timbangan) yang benar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Neraca yang benar yaitu neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 143.

⁴⁷ Abdul Aziz Ahmad, Muhammad Sya'ban Al-Hafizh (Ed.), *An-Nisa': Al-Qur'an for Ladies...*, hlm. 285.

tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan secara curang.⁴⁸ Dari beberapa ayat al-Qur'an di atas bahwa kaitannya dengan evaluasi, harus melaksanakan evaluasi secara adil, tidak lebih-lebihkan maupun tidak dikurangi.

Evaluasi atau dalam hal ini auditing, merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.⁴⁹ Untuk melaksanakan audit, perlu adanya informasi yang dapat diverifikasi dan punya kriteria yang dapat dijadikan sebagai upaya pengevaluasian dari informasi tersebut.

Proses evaluasi dilakukan dalam kegiatan pengelolaan keuangan tujuannya adalah agar berjalan secara efektif dan efisien dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya. Ada beberapa jenis evaluasi keuangan (auditing), yaitu:⁵⁰

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hlm. 477-478.

⁴⁹ Tim Dosen, *Manajemen Pendidikan,...*, hlm. 267.

⁵⁰ Rahmat Hidayat dan H. Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan: LPPPI, 2017), hlm. 116.

- a) Audit laporan keuangan, bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi, telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.
- b) Audit operasional, merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi lembaga.
- c) Audit ketaatan, bertujuan mempertimbangkan apakah auditi (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

Pada tahapan evaluasi, kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Dana yang digunakan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang.⁵¹ Setelah auditing maka muncul

⁵¹ Muhamad, *Manajemen Pendidikan...*, hlm.198.

pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan pembuatan laporan yang dipertanggungjawabkan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi *stakeholder* lembaga pendidikan.⁵²

Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui:

- a) Kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku.
- b) Kesesuaian hasil yang dicapai baik dibidang teknis administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan.
- c) Kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efektif dan efisien.
- d) Sistem yang lain atau perubahan system guna mencapai hasil yang lebih sempurna.

Pengawasan keuangan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan. Pada dasarnya pengawasan merupakan usaha sadar untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.⁵³

Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus

⁵² Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 269.

⁵³ Muhamad, *Manajemen Pendidikan...*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 100.

dilaporkan dan dipertanggung jawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan dari mana sumber dana diperoleh.

Berkaitan dengan pengawasan, ada beberapa sasaran dan jenis pengawasan:

- a) Sasaran pengawasan, yaitu:
 - i. Dimensi kuantitatif, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai.
 - ii. Dimensi kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana.
 - iii. Dimensi fungsional, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula.
 - iv. Dimensi efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat.
- b) Ada jenis-jenis pengawasan, yaitu:
 - i. Berdasarkan subjeknya:
 - (1) Pengawasan intern, yaitu pengawasan terhadap semua unit dan bidang kegiatan yang ada di dalam organisasi.
 - (2) Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya pengawasan dari luar organisasi yang mempunyai wewenang mengawasi.
 - ii. Berdasarkan waktunya:
 - (1) Pengawasan terus menerus, yaitu pengawasan yang tidak bergantung pada waktu tertentu, lebih merupakan pengawasan rutin.

- (2) Pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu, berdasarkan rencana yang ditujukan terhadap masalah umum.
- (3) Pengawasan insidental, yaitu pengawasan yang dilaksanakan secara mendadak diluar rencana kerja rutin atau berdasarkan keperluan.⁵⁴

Martin juga menuturkan bahwa kaitannya dengan penggunaan anggaran pendidikan, pengawasan dikategorikan sebagai berikut:⁵⁵

- a) Pengawasan melekat, atau disingkat waskat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya, atau pengawasan terhadap kinerja bawahan dilaksanakan oleh atasannya langsung bukan oleh pihak lain. Meski atasan tidak memiliki jabatan pengawas, tetapi ia memiliki fungsi pengawasan melekat pada jabatannya sebagai kepala bagian atau sebagai pimpinan suatu unit kerja.
- b) Pengawasan fungsional, atau disingkat wasnal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang berfungsi sebagai pengawas (pekerjanya sebagai pengawas). Misalnya, Inspektorat Jenderal pada Kementerian Agama atau para pengawasan pada tingkat satuan pendidikan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- c) Pengawasan legislatif, atau disingkat wasleg adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan legislatif, yaitu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pelaksanaan rencana dan program kerja pemerintah misalnya. Dalam hal ini pengawasan oleh DPRD terhadap rencana dan program kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

⁵⁴ Mustari, *Manajemen...*, hlm. 202-203.

⁵⁵ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan...* hlm. 188-192.

- d) Pengawasan masyarakat, atau disingkat wasmas adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat baik anggota masyarakat secara individual maupun berkelompok dengan cara melihat, memerhatikan, memonitor, menilai, dan melaporkan pelaksanaan suatu unit kerja.

Pertanggungjawaban (*auditing*) menurut Cormark merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas. Proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak. Evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.

Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Dimulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditandatangani sebagai berita acara oleh kepala sekolah.⁵⁶

⁵⁶ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah...*, hlm. 201-202.

Jadi, fungsi-fungsi manajemen keuangan pada dasarnya adalah serangkaian aktivitas di dalam manajemen, meliputi hal yang paling penting, yaitu perencanaan. Kemudian, ada pengelolaan atau implementasi dari kegiatan yang telah direncanakan. Pengarahan yang juga merupakan hal penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir, evaluasi untuk mengetahui kesesuaian kegiatan yang telah dilakukan dari tahap awal sampai akhir sehingga memunculkan rencana tindak lanjut maupun rekomendasi untuk keberhasilan program yang kelak dilakukan dengan efektif dan efisiensi.

2. Biaya Pendidikan

a. Pengertian Biaya Pendidikan

Konsep biaya dalam bahasa Inggris digunakan istilah *cost, financial, expenditure*. Biaya menurut para akuntan dalam Ursy dan Hammer yang dikutip oleh Nanang Fattah adalah sebagai “*cost as an exchange, a forgoing, a sacrifice made to secure benefit*”.⁵⁷

Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental (*instrument input*) yang sangat penting dalam pendidikan. Dasar pemikirannya adalah pendidikan merupakan sumber kunci pembangunan ekonomi dan

⁵⁷ Nanang Fattah, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 5.

sekaligus sebagai *outcome* proses pembangunan. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan yang akan mencapai tujuan tertentu.

Agar dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pembenahan manajemen pembiayaan pendidikan nasional dalam setiap level mutlak diperlukan untuk memberdayakan seluruh potensi pendidikan sejak dari pusat hingga pada satuan-satuan pendidikan. Salah satu kebijakan yang paling mendasar dari pemerintah nasional untuk mengatasi kesulitan manajemen pembiayaan tersebut adalah dengan otonomi daerah (pelimpahan pengelolaan keuangan).⁵⁸

Konsep biaya pendidikan menurut Nanang Fattah, meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sedangkan biaya tidak langsung merupakan keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.⁵⁹

⁵⁸ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 93-94.

⁵⁹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan...*, hlm. 23.

Pembiayaan pendidikan menitikberatkan upaya pendistribusian benefit atau keuntungan pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.⁶⁰

Uhar Suharsaputra mengungkapkan bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya keterlibatan uang dalam kajian pendidikan, karena pendidikan merupakan benda ekonomi yang langka, dan uang merupakan salah satu yang perlu dikorbankan untuk mendapatkannya. Menurut Thomas H. Jones, berpendapat bahwa,

“money come into play in the education enterprise in three areas: (1) economics of education, (2) school fnance, (3) school business administration”.⁶¹

Menurut H. M. Levin, makna dari pembiayaan atau pendanaan sekolah adalah:

“School finance refers to the process by which tax revenues and other resources are derived for the formation and operation of elementary and seondary

⁶⁰ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan...*, hlm. 77.

⁶¹ Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan...*, hlm. 289.

schools as well as the process by which those resources are allocated to school in different geographical areas and to types and levels of education”.⁶²

Dapat dilihat bahwa manajemen keuangan menyangkut bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan atau mengalokasikan dana dengan tingkat pendidikan yang berbeda secara efektif dan efisien.

b. Jenis-Jenis Biaya Pendidikan

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 3, terdapat beberapa jenis biaya pendidikan, yaitu:

- 1) Biaya satuan pendidikan; yang terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, beasiswa.
- 2) Biaya penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan; meliputi biaya investasi, biaya operasi.
- 3) Biaya pribadi peserta didik.⁶³

Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 62 bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

⁶² Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan...*, hlm. 299.

⁶³ Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

- 2) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 3) Biaya operasi satuan pendidikan meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.⁶⁴

Biaya pada lembaga pendidikan biasanya meliputi:

- 1) *Direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* yaitu biaya yang langsung berproses dalam menunjang proses pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan, meliputi gaji guru dan personil lainnya, pembelian buku, fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran, buku perpustakaan, dan lain-lain. *Indirect cost* merupakan biaya yang tidak langsung menunjang proses pendidikan meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya-biaya lainnya.
- 2) *Social cost* dan *private cost*. *Social cost*, yaitu sejumlah biaya sekolah yang harus dibayar oleh masyarakat untuk

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

mendanai pendidikan. Sedangkan *private cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga atau perseorangan untuk membiayai pendidikan.⁶⁵

- 3) *Monetary* dan *non monetary cost*. *Monetary cost*, diartikan sebagai biaya langsung dan tidak langsung yang dibayar oleh masyarakat dan individu. *Non monetary cost* adalah kesempatan yang hilang karena digunakan untuk membaca buku dan belajar.⁶⁶
- 4) *Fixed cost* dan *variable cost*. *Fixed cost* merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk pengadaan barang-barang modal, seperti pembangunan gedung sekolah, pengadaan peralatan sekolah, pembayaran sewa fasilitas sekolah, dan lain-lain. *Variable cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai operasional sekolah, misalnya pengadaan buku pelajaran, pembayaran gaji pegawai, pembayaran langganan listrik, air, telepon dan pembayaran lainnya.⁶⁷

Menurut Nanang Fattah, dalam bukunya Imam Machali dan Ara Hidayat, dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro didasarkan perhitungan

⁶⁵ Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan...*, hlm. 290.

⁶⁶ Imam Machali, Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/ Madrasah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 405

⁶⁷ Arie Wibowo Kurniawan, dkk, *Manajemen Keuangan SMK...*, hlm. 22.

pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro didasarkan perhitungan biaya alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan murid.⁶⁸ Maka dari itu, pihak sekolah atau madrasah dalam menentukan biaya satuan pendidikan hendaknya memperhitungkan dari aspek sumber dana dan juga pertimbangan jumlah murid sehingga dana yang diterima bisa dialokasikan dengan proporsional.

c. Sumber-Sumber Biaya Pendidikan

Di Indonesia, sumber-sumber biaya pendidikan secara umum lebih menunjukkan bauran pembiayaan oleh pemerintah pusat berupa APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pemerintah daerah berupa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), masyarakat, dan sebagian investor. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin dalam bukunya Mulyono di lingkungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Kabupaten Malang tentang dana-dana yang mengalir ke sekolah dan madrasah adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan Operasional Sekolah/ Madrasah (BOS). Dana ini bersumber dari pemerintah pusat (APBN) dan hanya diperuntukkan untuk wajib belajar sembilan tahun.
- 2) Bantuan Khusus Murid (BKM)
- 3) Bantuan Khusus Guru (BKG)

⁶⁸ Imam Machali, Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management...*, hlm. 405.

- 4) Imbalan Swadaya
- 5) *School Green* (Khusus SMK)
- 6) Biss Mutu (Khusus SMA)
- 7) Dana Dikonsentrasi (Dikon)
- 8) Dana Rehab (Khusus SD/ MI)
- 9) BMI Cabang Malang
- 10) Beasiswa BSF (*Basic School Foundation*)
- 11) Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf
- 12) Dana Bantuan Orangtua berupa SPP.⁶⁹

Temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Budi budaya dalam jurnalnya, bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menanggung pembiayaan pendidikan, akan tetapi pembiayaan tersebut belum mencukupi untuk menjalankan seluruh kegiatan yang ada di sekolah.⁷⁰ Maka dari itu, sekolah atau madrasah perlu melakukan penggalan sumber dana yang variatif agar seluruh rencana kegiatan sekolah bisa sesuai dengan yang telah dianggarkan sehingga kebutuhan bisa terpenuhi.

Selain itu, menurut Mustari sumber keuangan dan pembiayaan sekolah secara garis besar sebagai berikut:⁷¹

- 1) Dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini biasanya disebut dana

⁶⁹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan...*, hlm. 122-126.

⁷⁰ Budi Budaya, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Yang Efektif", *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, (Vol. 18, No. 1), hlm. 50.

⁷¹ Mustari, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 173-174.

rutin. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, pemerintah juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.

- 2) Dana dari orangtua siswa. Pendanaan ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus di bayar oleh orangtua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Pada umumnya, dana komite terdiri atas:
 - a) Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orangtua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah.
 - b) Dana insidental yang dibebankan pada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun selama menjadi siswa (pembayarannya bisa diangsur).
 - c) Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orangtua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara suka rela tanpa suatu ikatan apapun.
- 3) Dana dari masyarakat. Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian

terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpenggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta.

- 4) Dana dari alumni. Bantuan dari para alumni untuk membantu meningkatkan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang. Namun, dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat. Dana ini diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum sekolah.
- 5) Dana dari peserta kegiatan. Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler.
- 6) Dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, fotokopi, dan lain-lain.

B. Kajian Pustaka Relevan

Kajian pustaka atau *literature review* memiliki tujuan yaitu mengetahui hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan atau yang akan dilaporkan, mengetahui studi yang sedang hangat diperbincangkan, dan memberikan kerangka berpikir akan pentingnya penelitian yang dilakukan dan juga menjadi tolok ukur dalam membandingkan temuan penelitian satu dengan lainnya.⁷² Peneliti menyadari bahwa secara substansial dan penyajian, penelitian ini terlebih dahulu meninjau hasil penelitian lain sebelumnya. Peneliti memaparkan beberapa kajian yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Neng Arizka dengan judul ”*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Yayasan Darul Inayah Cisarua Bandung Barat*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan di Yayasan Darul Inayah Cisarua Bandung Barat dilakukan dengan cara koordinasi, identifikasi, penyusunan anggaran belanja yang ditentukan oleh ketua Yayasan, dewan pengurus dan santri. Pelaksanaannya, dengan menyeimbangkan antar penerimaan dan pengeluaran dana. Evaluasi yang dilakukan oleh ketua Yayasan dan dewan pengurus dengan melihat buku perincian pemasukan dan pengeluaran dana dan

⁷² Asri Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), hlm.34.

mempertanggungjawabkan sumber-sumber dana dari donatur dialokasikan sesuai kebutuhan operasional Yayasan.⁷³

Kesamaan penelitian terletak pada pembahasan manajemen pembiayaan atau pengelolaan keuangan pendidikan. Sedangkan perbedaan yang terjadi adalah jika fokus penelitian Neng terhadap pengelolaan keuangan pendidikan yang bersumber dari masyarakat di Yayasan pendidikan, sedangkan peneliti berfokus pada pengelolaan keuangan di Madrasah Ibtidaiyah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurfaedah Djaelani dengan judul “*Analisis Pengelolaan Dana Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa (Studi Kasus: Program Pendidikan Sekolah SMART Ekselensia Indonesia)*”. Hasil penelitiannya adalah pengelolaan dana pendidikan yang dilakukan sekolah SMART Ekeselensia cukup baik dalam beberapa aspek, yaitu aspek perencanaan, pembukuan dan pelaporan. Hal ini dibuktikan dengan adanya RKAT yang disusun secara rinci dan pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan, adanya transparansi penyajian laporan keuangan, akuntabilitas laporan keuangan setiap bulannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Aspek pengawasan, masih perlu perbaikan karena masih terjadi permasalahan ketidakcocokan laporan keuangan.⁷⁴

⁷³ Neng Ariska, “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Yayasan Darul Inayah Cisarua Bandung Barat”, *Skripsi* (Semarang: Program Sarjana UIN Walisongo, 2018).

⁷⁴ Nurfaedah Djaelani, “Analisis Pengelolaan Dana Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa (Studi Kasus: Program Pendidikan

Kesamaan penelitian di atas terletak pada pengelolaan dana pendidikan. Sedangkan perbedaan penelitian yang diteliti adalah objek penerima dana pendidikan yang dilakukan di beberapa tingkat satuan pendidikan dalam hal ini adalah Sekolah SMART Ekselensia oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, sementara objek penerima dana yang diteliti bagaimana manajemen keuangan pendidikan berfokus pada pendidikan dasar, yaitu Madrasah Ibtidaiyah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki Aziz dengan judul ”*Impelementasi Manajemen Keuangan Pendidikan di Rumah Gemilang Indonesia Sawangan Depok*”. Hasil penelitiannya adalah implementasi manajemen keuangan pendidikan di Rumah Gemilang Indonesia terdiri dari perencanaan keuangan tertulis tangan, penganggaran yang sepenuhnya kuasa diluar Rumah Gemilang Indonesia, yakni berada pada divisi keuangan LAZ Al-Azhar, pelaksanaan keuangan yang hanya melibatkan staff keuangan dan manajer keuangan walau ada pengawasan dari kepala divisi program LAZ Al-Azhar, audit yang dilaksanakan seadanya, pelaporan keuangan seringkali terlambat mengakibatkan perencanaan pengajuan dana selanjutnya tidak dapat diproses, vital terhadap keberlangsungan hidup santri yang bergantung pada pembiayaan RGI.⁷⁵

Sekolah SMART Ekselensia Indonesia”, *Skripsi* (Jakarta: Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

⁷⁵ Muhammad Zaki Aziz “Impelementasi Manajemen Keuangan Pendidikan di Rumah Gemilang Indonesia Sawangan Depok”, *Skripsi* (Jakarta: Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Kesamaan penelitian di atas di atas terletak pada pengelolaan keuangan pendidikan. Sedangkan perbedaan penelitian yang diteliti terletak pada fokus pembahasan. Penelitian di atas fokus pada implementasi dan hambatan yang terjadi, sementara fokus peneliti adalah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan keuangan pendidikan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Umi Zulfa dengan judul “*Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat: Analisis School Levy*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model alternatif dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan, khususnya dalam pencarian sumber pembiayaan pendidikan tambahan menggunakan konsep *school levy*, yaitu sekolah yang pembiayaannya didukung oleh orang-orang yang relatif memiliki kelebihan/ kekayaan. Orang-orang tersebut, dalam Islam termasuk ke dalam kelompok orang yang berkewajiban membayar zakat. Penerapan model *school levy* berarti persoalan pembiayaan pendidikan yang selama ini masih belum memadai dapat di atasi dengan cara memberdayakan potensi umat (Islam) yang pada dasarnya memiliki konsep Ziswa apabila dikelola dengan baik akan menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan tersedia secara terus menerus.⁷⁶

Kesamaan penelitian di atas terletak pada pembahasan pembiayaan pendidikan. Sedangkan perbedaan yang terjadi adalah pada permasalahan yang diteliti. Pada penelitian di atas permasalahan

⁷⁶ Umi Zulfa, “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat: Analisis School Levy”, *Jurnal*, (Vol. XVII No. 2, 2012).

yang diteliti adalah alternatif sumber dana pendidikan, sementara yang diteliti peneliti adalah berfokus pada pengelolaan keuangan di Madrasah Ibtidaiyah.

Ke lima, penelitian yang dilakukan oleh Magda Ismail Abdel Mohsin dengan judul penelitian *Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs*. Hasil penelitian adalah potensi wakaf tunai di bidang pembiayaan atau pendanaan tidak hanya diperuntukkan dalam ranah keagamaan, tetapi juga pendanaan barang yang berbeda dan jasa yang dibutuhkan secara global, seperti pendidikan, kesehatan, kepedulian sosial dan mengaktivasi komersial, infrastruktur dasar, selain membuka lapangan pekerjaan. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk membuka pintu lebih lebar bagi para peneliti lebih banyak untuk menggali potensi wakaf tunai sebagai salah satu instrumen untuk pendanaan semua sektor.⁷⁷

Kesamaan penelitian terletak pada pembahasan pembiayaan pendidikan. Perbedaan yang terjadi adalah fokus penelitian. Penelitian di atas lebih berfokus pada pembiayaan pendidikan melalui Wakaf. Sementara peneliti hanya berfokus membahas berfokus pada pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah.

⁷⁷ Magda Ismail Abdel Mohsin, *Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs*, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, (Vol. 6, No. 4, tahun 2013).

C. Kerangka Berpikir

Manajemen keuangan pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh satuan pendidikan karena setiap sayuan pendidikan membutuhkan biaya (*money*) untuk menggerakkan potensi sumber daya yang lain dalam sebuah organisasi pendidikan. Keuangan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

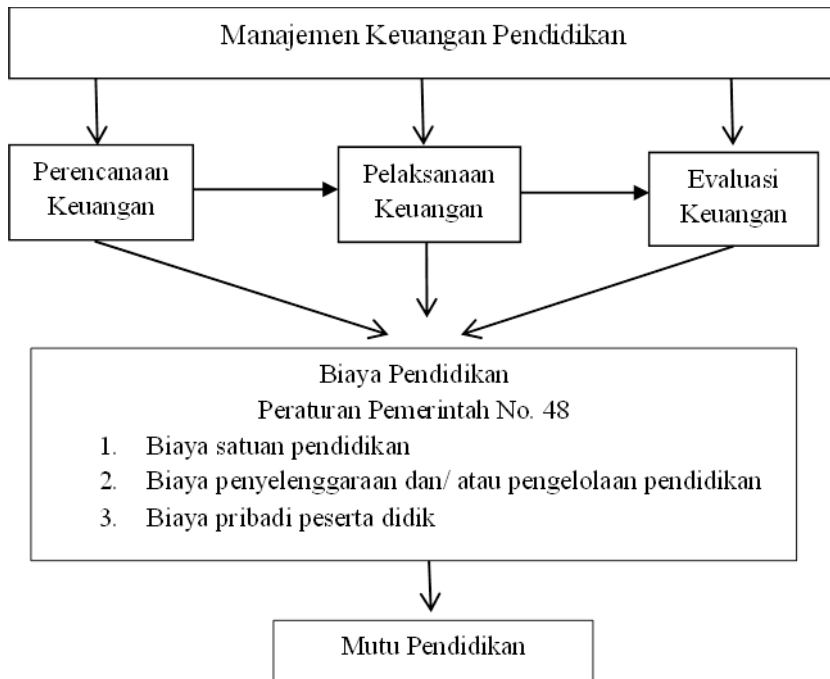
Fungsi manajemen keuangan mencakup perencanaan keuangan pendidikan, pelaksanaan keuangan pendidikan, dan evaluasi keuangan pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut digunakan untuk mengelola biaya dan pendanaan lain yang berkaitan dengan sumber penerimaan, pengelolaan, pengeluaran dan juga evaluasi dari keuangan pendidikan.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh lini, yaitu sumber dana pendidikan tidak hanya bersumber dari pemerintah saja. Pendanaan dalam pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh warga masyarakat dan juga pemerintah yang mencakup biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik.

Dengan demikian penelitian yang dilakukan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Hikmah Menganti Kedung adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen keuangan yang telah disebutkan di atas sehingga pengelolaan keuangan pendidikan dikelola dengan efektif dan efisien. Selanjutnya maka

pendidikan bisa berjalan sesuai yang telah direncanakan dan kebutuhan akan pendidikan bisa terpenuhi sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas dan mutu pendidikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.¹⁵³ Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

Peneliti mengamati, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana manajemen keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung, dengan demikian penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai kenyataan dan fakta yang relevan. Sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis manajemen keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

¹⁵³ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 26.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi objek penelitian adalah MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 06 November 2019 sampai dengan 06 Desember 2019 di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara. Lembaga tersebut beralamat di Jalan Menganti – Bugel, Km No.7, Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan beberapa hal, antara lain: 1) kelayakan obyek yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang akan menunjang tercapainya tujuan penelitian, 2) hasil penelitian ini untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai manajemen keuangan pendidikan dan pentingnya mengetahui proses manajemen keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek penelitian tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data, bisa berupa masyarakat, perorangan, arsip, instansi dan sebagainya.¹⁵⁴ Adapun sumber data yang digali informasinya oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹⁵⁴ Sangadji, *Metodologi Penelitian*,... hlm. 169.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).¹⁵⁵

Data tersebut merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan.¹⁵⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah dan Bendahara MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.¹⁵⁷ Data sekunder dalam penelitian ini peneliti mengambil dari dokumentasi ataupun data arsip laporan yang dimiliki madrasah, maupun dari buku atau dokumentasi, seperti profil madrasah, visi dan misi madrasah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, program dan prestasi yang dimiliki, dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan, RKAM, RAPBM dan data yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁵⁵ Sangadji, *Metodologi Penelitian*,...hlm. 44.

¹⁵⁶ Usman Rianse dan Abdi, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung, Alfabeta, 2012), hlm. 212.

¹⁵⁷ Sangadji, *Metodologi Penelitian*,...hlm. 44.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan terhadap bagaimana manajemen keuangan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian. Berikut ini diuraikan teknik penumpulan data yang digunakan:

1. Observasi

Dari segi instrumentasi yang digunakan dibedakan menjadi observasi struktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya, dan telah tahu pasti variabel apa yang akan diamati. Sedangkan observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Observasi ini tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa ramu-rambu pengamatan.¹⁵⁸

Observasi dilakukan pada tanggal 06 November 2019 dan pada tanggal 23 November 2019. Pada tanggal 06 November 2019, observasi yang dilakukan adalah mengamati bendahara madrasah dalam pencatatan keuangan madrasah. Observasi yang dilakukan

¹⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 165-168.

pada tanggal 23 November 2019 untuk mengamati dan mencatat kegiatan penyerahan penerimaan dari sumber dana ke koperasi yayasan Pelopor 55 di MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

2. Wawancara

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵⁹ Adapun wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara dimana peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara.¹⁶⁰

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada sumber data yaitu kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan bendahara madrasah. Berikut rinciannya:

- a. Wawancara dengan Kepala MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, Bapak Dul Karim, S.Pd.I selaku kepala MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara pada hari Rabu, 06 November 2019 di ruang tamu madrasah. Dari wawancara tersebut peneliti mendapat informasi yang berkaitan dengan

¹⁵⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 29.

¹⁶⁰ Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group...*, hlm. 63-69.

perencanaan dan evaluasi keuangan pendidikan di MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

- b. Wawancara dengan Wakil Kepala MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, Bapak Aswad Adduali, SE.Sy., dilaksanakan pada hari Rabu, 06 November 2019 di ruang tamu madrasah. Dari wawancara tersebut peneliti mendapat informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keuangan pendidikan di MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.
- c. Wawancara dengan Bendahara MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, Ibu Munzaroah, S.Pd.I, dilakukan pada hari Rabu, 06 November 2019 di ruang tamu madrasah. Dari wawancara tersebut peneliti mendapat informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keuangan pendidikan di MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif ini.¹⁶¹ Metode dekomentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-

¹⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 240.

buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian.¹⁶²

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen, dalam penelitian ini berupa profil madrasah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, program dan prestasi yang dimiliki, dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan madrasah, RAPBM dan RKAM, serta dokumen tentang kegiatan sebagai tambahan penguat penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data diperlukan dalam penelitian ini agar data yang dikumpulkan serta mendapatkan makna langsung terhadap tindakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan suatu pendekatan terhadap pengumpulan data, dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda dan berdiri sendiri.¹⁶³ Pada penelitian ini uji keabsahan data menggunakan triangulasi data, yaitu peneliti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber yang menjadi temuan, untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan bendahara MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

¹⁶² Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 219.

¹⁶³ Haji Boy S. Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 25

Dari hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil dokumentasi maupun pengamatan yang telah dilakukan untuk mengetahui tentang manajemen keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara. Setelah itu, data tersebut dideskripsikan dan dikategorikan sebagai bahan analisis.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis data secara umum merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.¹⁶⁴ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.¹⁶⁵ Menurut N. K. Malhotra, tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁶⁶

Langkah-langkah analisis data:

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang

¹⁶⁴ Sugiyono, Apri Nuryanto (Ed.), *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung, Alfabeta), hlm. 169.

¹⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, hlm. 245.

¹⁶⁶ Sangadji, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 199.

yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.¹⁶⁷

Tahapan reduksi data dilakukan untuk mereduksi data-data yang telah diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini berarti data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah terkumpul kemudian dirangkum, membuang yang tidak perlu dan memfokuskan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dengan pengambilan tindakan. Penyajian data ini tidak hanya disajikan dengan teks naratif, akan tetapi perlu juga dilengkapi dengan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan.¹⁶⁸ Penyajian data dalam penelitian ini dengan menguraikan hasil penelitian yang telah didapat dengan teks naratif, sehingga peneliti dapat menyajikan data dengan sistematis dan substantif yang berkaitan dengan

¹⁶⁷ Sangadji, *Metodologi Penelitian*,...hlm. 199.

¹⁶⁸ Sangadji, *Metodologi Penelitian*,...hlm. 200.

manajemen keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁶⁹ Peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan dengan mencermati dan menggunakan pola pikir yang dikembangkan. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian ini menjawab semua rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti. Verifikasi data dimaksudkan untuk menentukan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis sehingga keseluruhan permasalahan mengenai pengelolaan keuangan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara dapat terjawab sesuai dengan data dan permasalahannya.

¹⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 15.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A.Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Profil MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara

a. Sejarah Singkat MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara

MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara merupakan salah satu instansi pendidikan islam yang dikelola oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Darul Hikmah yang secara struktural berada di bawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Jepara. Lembaga ini didirikan secara swadaya pada tahun 1955 oleh masyarakat desa Menganti yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan pengembangan pendidikan yang berbasis agama Islam yang diprakarsai oleh K.H. Sulaiman Tamam. Namun pada saat itu nama lembaganya adalah MI Roudhotul Mutaalimin dan berubah sejak tahun 1971 menjadi Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah.

Sejak berubah nama menjadi MI Darul Hikmah, madrasah ini terus berkembang, tumbuh dari masyarakat untuk masyarakat serta terus melaju menciptakan peserta didik yang berprestasi dan mampu bersaing dengan madrasah lain. MI Darul Hikmah berusaha menjadi sekolah modern berbasis Islami sesuai dengan visi dan misinya. Sebagai sekolah formal Madrasah Ibtidaiyah berusaha mengikuti tuntutan zaman yang

selalu berubah, maka MI Darul Hikmah membekali peserta didiknya dengan ilmu pengetahuan mumpuni di bidang umum maupun pendidikan agama.

MI Darul Hikmah beralamat di Desa Menganti RT 09 RW 03, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Berdiri di atas tanah dan gedung hak milik sendiri dan bersifat permanen dengan luas 1037,78 m². MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara memiliki beberapa program unggulan, yaitu Kelas *Tahfizh*, *Fullday Class*, Kelas Sains dan Bahasa. Status akreditasi yang dimiliki adalah A dengan nilai 92 berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Hasil Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M) Nomor 166/ BAP-SM/ XI/ 2015.¹⁸⁷

b. Visi dan Misi MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara

Visi MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara adalah “Islami Berkualitas dan Populis”.

- 1) Islami. Menjadi Madrasah yang mampu menciptakan anak didik yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta mencerminkan nilai – nilai islami.
- 2) Berkualitas. Menjadi madrasah berprestasi dan unggulan yang memiliki kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan zaman.
- 3) Populis. Menjadi madrasah yang tumbuh, berkembang, dan dapat diterima serta dipercaya masyarakat.

¹⁸⁷ Dokumentasi, *Profil MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara*, 06 November 2019.

Dalam rangka mewujudkan visinya maka MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara menjabarkan visi tersebut kedalam misi-misi. Adapun misi dari MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan lahir batin kepada anak didik guna menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
- 2) Meletakkan dasar-dasar keimanan dan keislaman kepada anak didik melalui pendekatan akhlaqul karimah dan uswatun hasanah.
- 3) Membentuk anak didik yang cerdas, terampil dan mandiri dengan berbudi pekerti yang luhur.
- 4) Menyebarkan dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan guna tercapainya pendidikan nasional.
- 5) Menyiapkan generasi muda yang handal, tangguh, dan siap menghadapi tantangan zaman.¹⁸⁸

c. Keadaan Guru, Tenaga Kependidikan, Siswa di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara

1) Keadaan Guru dan Tenaga Kependidikan

MI Darul Hikmah Menganti tentunya tidak terlepas dari sumber daya manusia yang kompeten dalam dunia pendidikan, yaitu guru dan tenaga kependidikan. Tenaga

¹⁸⁸ Dokumentasi, *Profil MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara*, 06 November 2019.

pengajar, tata usaha dan karyawan MI Darul Hikmah Menganti berjumlah 31 orang, yang terdiri atas satu kepala madrasah, enam guru khusus program *Tahfizh*, 21 guru regular, satu staf tata usaha, satu staf perpustakaan dan satu petugas kebersihan.¹⁸⁹ Adapun rincian data pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Dul Karim, S.Pd.I	Kamad
2	Aswad Addu Ali Humad Al Alim, S.E.Sy	Wakil Kamad
3	Ahmad Ali Ifni, S.Pd.I	Tata Usaha
4	Munzaroah, S .Pd.I	Bendahara
5	H. Karsalim, S.Pd.I	Guru MI
6	Hj. Kustini, S.Pd.I	Guru MI
7	H. Sidiq, S.Pd	Guru MI
8	Sabit Wafiuddin, S.Pd.I	Guru MI
9	Mukarromah, S.Sy	Guru MI
10	Agus Hadiyanto, S.Pd.I	Guru MI
11	Syaiful Habib, S.Pd.I	Guru MI
12	Yois Rismarini, S.T	Guru MI
13	Nur Hakim, S.Ag	Guru MI
14	Siti Zurotun, S.Pd.I	Guru MI
15	Zumrotun, S.Ag	Guru MI
16	Iing Maratul Azizah, S.Pd.I	Guru MI
17	Hj. Mahmudah, S.Pd.I	Guru MI
18	Nurikah, S.Pd.I	Guru MI
19	Junaidah, S.Pd.I	Guru MI
20	Kholifatul Karromah, S.Pd.I	Guru MI
21	Tutik Noviana, S.Pd.I	Guru MI
22	Anis Jariyati, S.Pd	Guru MI
23	Agus Ranu Setiabudi, A.Md	Guru MI
24	Zainatul Afiyah, A.H	Guru Tahfidz
25	Rubiatul Karimah, A.H	Guru Tahfidz
26	Nita Oktavia, A.H	Guru Tahfidz

¹⁸⁹ Dokumentasi, *Profil MI Darul Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara*, 06 November 2019.

27	Asrori, A.H	Guru Tahfidz
28	Umi Liyanti, A.H	Guru Tahfidz
29	Roudhotul Aliyah, A.H	Guru Tahfidz
30	Saiful Amin	Penjaga Perpus
31	Kemadi	Tukang Kebun

Tabel 4. 1. Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI Darul Hikmah

2) Keadaan Siswa

Saat ini jumlah siswa MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara berjumlah 411 siswa terdiri dari 121 siswa kelas 1, 80 siswa kelas 2, 65 siswa kelas 3, 54 siswa kelas 4, 61 kelas 5 dan 30 siswa kelas 6. Adapun jumlah siswa secara rinci di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara dapat dijelaskan dalam tabel berikut:¹⁹⁰

NO	KELAS	A			B			C			D			JUMLAH		
		L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J	L	P	J
1	I	18	12	30	10	13	23	16	14	30	21	17	38	65	56	121
2	II	11	8	19	4	14	18	23	20	43	-	-	-	38	42	80
3	III	10	21	31	22	12	34	-	-	-	-	-	-	32	33	65
4	IV	14	7	21	16	17	33	-	-	-	-	-	-	30	24	54
5	V	15	16	31	12	18	30	-	-	-	-	-	-	27	34	61
6	VI	15	15	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	30

Tabel 4. 2. Daftar Siswa MI Darul Hikmah

¹⁹⁰ Dokumentasi, *Profil MI Darul Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara*, 06 November 2019.

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Perencanaan Keuangan Pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara

Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis dalam menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam merencanakan keuangan pendidikan, MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara memiliki beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Penyusunan Anggaran Belanja Madrasah

1) Identifikasi Kebutuhan

Tahap awal yang dilakukan madrasah adalah dimulai dengan mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan di masa mendatang. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Madrasah, Bapak Dul Karim, S.Pd.I., dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam keuangan madrasah, meliputi salah satunya adalah sumber dana. Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan identifikasi kebutuhan kemudian membuat anggaran. Anggaran tersebut nantinya diajukan ke pengurus (dalam hal ini adalah yayasan). Setelah pengajuan anggaran akan diketahui diterima atau tidaknya ajuan anggaran tersebut. Yang terlibat dalam penyusunan anggaran atau adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan pengurus yayasan.”¹⁹¹

¹⁹¹ Wawancara dengan Bapak Dul Karim, S. Pd. I, Kepala Madrasah MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

Selanjutnya, Bapak Aswad selaku wakil kepala madrasah menuturkan:

“Proses perencanaan yang dilakukan adalah masing-masing elemen menganalisis kebutuhan dari berbagai program, kemudian dipadukan. Lalu, disetorkan kepada saya (wakil kepala madrasah), baru ke bendahara madrasah dengan tujuan agar terukur.”¹⁹²

Bendahara madrasah, yaitu Ibu Munzaroah, memaparkan terkait dengan perencanaan keuangan di MI Darul Hikmah, bahwa:

“Sistem perencanaan keuangan, yaitu dengan menyusun RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) dimana penyusunan RKAM melibatkan komite, guru-guru, jika mempunyai pendapat bisa ditampung. Penyusunan RKAM dilaksanakan awal tahun pelajaran dengan rapat.”¹⁹³

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan di atas, bahwa dalam penyusunan anggaran belanja madrasah dimulai dari menganalisis kebutuhan dari berbagai program dan dipadukan satu sama lain oleh pihak yang terlibat. Adapun pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran adalah kepala madrasah, bendahara, guru-guru, komite atau pengurus yayasan. Selanjutnya,

¹⁹² Wawancara dengan Bapak Aswad Addu Ali, SE., Sy., Wakamad MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

¹⁹³ Wawancara dengan Ibu Munzaroah, S.Pd.I, Bendahara MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

waktu pelaksanaan penyusunan dilaksanakan pada awal tahun ajaran.

Berdasarkan dokumentasi oleh peneliti, identifikasi kebutuhan pada penyusunan rencana anggaran belanja madrasah dari tahun ke tahun hampir sama. Adapun kebutuhan yang diperlukan oleh MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara diantaranya adalah untuk 1) kepegawaian, 2) belanja barang, 3) belanja kurikulum, 4) belanja sarana dan prasarana, 5) belanja humas, 6) belanja kesiswaan, 7) belanja daya dan jasa, 8) belanja non APBM, dan 9) belanja lain-lain.¹⁹⁴ Kebutuhan tersebut disesuaikan yang diperlukan oleh madrasah.

2) Identifikasi Sumber Dana

Penyusunan rencana anggaran dan belanja madrasah di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara mengidentifikasi sumber dana yang akan diperoleh untuk membiaya rencana kegiatan yang telah disusun dan dijabarkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah. Adapun sumber dana yang diperoleh MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara berasal dari pemerintah berupa dana BOS dan dari SPP siswa kelas *Tahfizh*.¹⁹⁵

Seerti yang dikatakan oleh kepala madrasah bahwa:

¹⁹⁴ Dokumentasi.

¹⁹⁵ Dokumentasi.

“Sumber dana diperoleh dari BOS, *Syahriyyah* (SPP) dari siswa program Kelas *Tahfizh*. BOS dari pemerintah. *Syahriyyah* atau sumbangan orang tua wali hanya dibebankan di kelas yang program *tahfidz* sebesar Rp. 100.000.”¹⁹⁶

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Munzaroah bahwa dana BOS yang diterima oleh MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara pada tahun ajaran 2019/ 2020 adalah sebesar Rp. 158.500 persiswa yang digunakan untuk keperluan kegiatan siswa sesuai dengan aturan penggunaan dana BOS. Lalu ada sumbangan SPP dari siswa kelas *Tahfizh* perbulannya adalah sebesar Rp. 100.000.¹⁹⁷

b. Pengembangan rencana anggaran belanja

Dalam proses pengembangan RAPBM di MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara meliputi beberapa tahapan, diantaranya inventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, menyusun anggaran berdasarkan skala prioritas, menentukan program kerja dan rincian program, dan pengesahan penyusunan RAPBM tersebut.

Penyusunan RAPBM sendiri tentunya memiliki pedoman yang digunakan. Pedoman tersebut dijadikan acuan dalam pembuatan rencana anggaran dan kegiatan yang akan dibuat.

¹⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Dul Karim, S. Pd. I, Kepala Madrasah MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Munzaroah, S.Pd.I, Bendahara MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

Pedoman yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Aswad:

“Tolok ukur perencanaan keuangan, dalam hal ini adalah program kegiatan mengacu pada tahun ajaran yang lalu.”¹⁹⁸

Diperkuat lagi oleh pak Dul karim:

“Pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan keuangan adalah analisis kebutuhan dengan skala prioritas, di *list* apa saja, baru kemudian di ajukan ke pengurus yayasan tadi. Dengan kata lain, pertimbangan dalam perencanaan adalah atas dasar analisis kebutuhan.”¹⁹⁹

Ibu Munzaroah juga menambahkan, kaitannya dengan pedoman yang digunakan di MI Darul Hikmah, yaitu:

“Pedoman dalam perencanaan keuangan, kalau BOS ada juknis / RKAM. Kemudian di yayasan ada pedoman dari RAPBM dijadikan sebagai juknis. Jika ada tambahan atau revisi anggaran, dikonsultasikan ke yayasan. Kemudian dana yang dapat disetorkan ke Pelopor 55, yaitu merupakan koperasi berbadan hukum dibawah naungan yayasan. Sistemnya ya tadi, dari penyusunan RKAM, RAPBM lalu disetujui atau tidak oleh yayasan. Pertimbangan dalam penyusunan perencanaan adalah realita dari tahun pembelajaran tahun lalu.”²⁰⁰

Setelah menyusun rencana anggaran kemudian diajukan kepada kepala madrasah untuk diteliti lebih lanjut, lalu kepala madrasah mengajukan kepada yayasan untuk mendapatkan

¹⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Aswad Addu Ali, SE., Sy., Wakamad MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

¹⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Dul Karim, S. Pd. I, Kepala Madrasah MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

²⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Munzaroah, S.Pd.I, Bendahara MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

persetujuan. Kegiatan tersebut berkenaan dengan membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, disimpulkan bahwa proses perencanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara dimulai dari penyusunan identifikasi dan analisis kebutuhan dan penyusunan anggaran yang melibatkan pengurus yayasan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara serta guru. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran madrasah dilakukan pada akhir tahun pelajaran menjelang awal tahun pelajaran baru.

Penyusunan rencana program baik akademik maupun non akademik dilakukan secara matang dan selektif. Tentunya, dalam perencanaan keuangan dilandasi dengan kebutuhan dan skala prioritas madrasah sesuai dengan standar pendidikan dan berdasarkan atas realisasi dari kegiatan dan anggaran madrasah sebelumnya. Kemudian, dikembangkan dan diajukan kepada pihak madrasah dan yayasan untuk disahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Pelaksanaan Keuangan Pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara

Setelah melaksanakan perencanaan keuangan pendidikan dan telah disetujui oleh kepala madrasah dan yayasan, kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan keuangan pendidikan. Dalam pelaksanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti

Kedung Jepara melakukan dua tahap kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran.

a. Penerimaan

1) Prosedur Penerimaan

Berikut penjelasan mengenai penerimaan berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara madrasah, Ibu Munzaroah:

“Pelaksanaan keuangan madrasah adalah kita menjalankan keuangan sesuai RAPBM, dan RAPBM dijadikan rambu-rambu atau pedoman dalam berjalan. Sumbernya dari BOS, Iuran Tahfidz. Prosedur penerimaan, kalau BOS, lewat rekening MI, diambil bendahara dan kepala dan langsung disetorkan ke pelopor 55. Iuran Tahfidz berasal dari wali murid yang dari kelas Tahfidz disetorkan ke wali kelas, kemudian dari wali kelas ke bendahara instansi, lalu ke bendahara pelopor 55. Kemudian pembukuan dalam penerimaan jelas ada.”²⁰¹

Senada dengan bendahara, kepala madrasah juga menuturkan bahwa:

“Sumber dana diperoleh dari BOS, *Syahriyyah* (SPP) dari siswa program Kelas *Tahfizh*. BOS dari pemerintah. *Syahriyyah* atau sumbangan orang tua wali hanya dibebankan di kelas yang program *Tahfidz* sebesar Rp. 100.000.”²⁰²

²⁰¹ Wawancara dengan Ibu Munzaroah, S.Pd.I, Bendahara MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

²⁰² Wawancara dengan Bapak Dul Karim, S. Pd. I, Kepala Madrasah MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

Mengenai penerimaan, wakil kepala madrasah, Pak Aswad menuturkan bahwa:

“Pelaksanaan keuangan pendidikan yaitu proses eksekusi dari kegiatan yang telah direncanakan. Sumbernya dari BOS, SPP kelas *Tahfizh*”.²⁰³

Dari beberapa informan di atas bahwa penerimaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara berasal dari BOS dan SPP kelas *Tahfizh*. Prosedurnya, apabila dari dana BOS maka masuk ke rekening madrasah yang diambil bendahara, kemudian disetorkan ke pelopor 55. Selanjutnya dari SPP kelas *Tahfidz* diawali dari pembayaran wali murid ke wali kelas kemudian disetorkan kepada bendahara madrasah. Dari bendahara madrasah sama-sama disetorkan ke pelopor 55.

Pelopor 55 merupakan koperasi berbadan hukum yang dimiliki oleh Yayasan darul Hikmah Menganti Jepara. Koperasi tersebut menyimpan uang dari mulai RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren dibawah naungan Yayasan Darul Hikmah. Uang disentral tersebut yang dikelola oleh masing-masing jenjang pendidikan di yayasan tersebut.²⁰⁴

²⁰³ Wawancara dengan Bapak Aswad Addu Ali, SE., Sy., Wakamad MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

²⁰⁴ Observasi, 29 November 2019.

Penyetoran dari penerimaan sumber dana dilakukan oleh bendahara ke Koperasi Pelopor 55 yang berada di kompleks Madrasah Tsanawiyah dan Masjid Yayasan Darul Hikmah. Selain menyetorkan penerimaan dari sumber dana, bendahara juga mencatat dan merekap pemasukan setiap harinya untuk menjaga keamanan dan penyalahgunaan, biasanya bendahara juga menyetorkan tabungan dari para siswa setiap akhir pekan.²⁰⁵

Di MI Darul hikmah Menganti Kedung Jepara dalam penerimaan dana, dari BOS maupun SPP *Tahfidz* akan disetorkan oleh bendahara ke Pelopor 55.

2) Pembukuan

Beberapa penerimaan dari berbagai sumber, perlu adanya pembukuan berdasarkan prosedur pengelolaan sesuai ketentuan. Pembukuan yang menjadi tugas bendahara madrasah kesemuanya dicatat oleh bendahara sesuai dengan sumber-sumber dana yang didapat. Kemudian digolongkan ke berbagai jenis.²⁰⁶

Pembukuan di MI darul hikmah Menganti Kedung Jepara diantaranya ada: jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, buku kas umum, surat pertanggungjawaban belanja perbulan, rincian data non APBM, rekapitulasi keuangan madrasah (untuk kalangan

²⁰⁵ Observasi, 29 November 2019.

²⁰⁶ Observasi, 06 November 2019.

madrasah sendiri). Kemudian untuk BOS (buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, dan kuitansi belanja atau nota).²⁰⁷

Dari hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerimaan dana pendidikan diperoleh dari 1) pemerintah berupa dana BOS. Alur penerimaan dana BOS masuk ke rekening MI setelah sebelumnya mengajukan RKAM, 2) SPP dari siswa kelas *Tahfidz* sebesar seratus ribu rupiah perbulan. SPP atau *Syahriyyah* tersebut diberikaan dari wali murid ke wali kelas. Dari wali kelas ke bendahara dan disetorkan ke Pelopor 55. Kemudian dari dokumentasi bisa diketahui bahwa pembukuan yang dilakukan MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara disesuaikan dengan jenis golongannya.

b. Pengeluaran

1) Prosedur Pengeluaran

Selaku bendahara, dalam pengeluaran madrasah Ibu Munzaroah menjelaskan bahwa:

“Pengeluaran sesuai program madrasah diusahakan sesuai. Jika ada sesuatu diluar APBM, ya dikonsulkan ke yayasan. Di yayasan ada uang disentral yang ada dibawah yayasan bernama pelopor 55 yang murni mengelola keuangan yayasan, salah satunya adalah MI. Pengeluaran kebutuhan diambilkan dari pelopor 55 sepengetahuan yayasan. Penerimaan nanti disetorkan, atas ajuan APBM pengambilannya, di acc atau tidak ya tergantung yayasan. Tugasnya ya sangat

²⁰⁷ Dokumentasi.

berat. Menerima dan mengeluarkan uang sesuai dengan yang diajukan dan di acc.²⁰⁸

Untuk prosedur pengeluaran yang dilakukan MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara digunakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ajuan APBM satu bulan ke depan yang berpedoman pada RAPBM yang telah disusun. APBM tersebut kemudian diajukan kepada kepala madrasah sebelum diajukan kepada pihak yayasan. Setelah kepala madrasah mendapat persetujuan, maka pengajuan dilanjutkan ke pihak yayasan. Jika ajuan sudah diterima oleh yayasan maka pengambilan dana untuk pengeluaran bendahara mengambil dana di Pelopor 55 oleh bendahara dan dibelanjakan sesuai kebutuhan madrasah. Setelah dana dikeluarkan untuk pembelanjaan harus disertai dengan kwitansi guna keperluan laporan. Kemudian dicatat ke dalam buku pengeluaran dana oleh bendahara.

2) Pembukuan

Sebelum membahas pembukuan, MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara berkenaan dengan rincian pengeluaran di jabarkan sebagai berikut:

Pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan peserta didik baru, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan

²⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Munzaroah, S.Pd.I, Bendahara MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

jasa, perwatan madrasah, pembayaran honorarium GBPNS dan tenaga kependidikan, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaannya BOS, pembelian perangkat komputer, dan biaya lain.²⁰⁹

Seperti halnya dengan penerimaan, pengeluaran keuangan juga tidak lepas dari pembukuan. Setelah dana dikeluarkan untuk pembelanjaan harus disertai dengan kwitansi guna keperluan laporan. Kemudian dicatat ke dalam buku pengeluaran dana oleh bendahara. Pembukuan pengeluaran di MI darul hikmah Menganti Kedung Jepara diantaranya ada: jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, buku kas umum, surat pertanggungjawaban belanja perbulan, rincian data non APBM, rekapitulasi keuangan madrasah (untuk kalangan madrasah sendiri). Kemudian untuk BOS (buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, dan kuitansi belanja atau nota).²¹⁰

Hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan dalam manajemen keuangan pendidikan MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara meliputi penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berkaitan dengan penerimaan sumber dana dan pembukuan. Setiap dana yang diterima, direkap oleh bendahara madrasah. MI Darul Hikmah

²⁰⁹ Dokumentasi, 23 November 2019.

²¹⁰ Dokumentasi, 06 November 2019.

menyimpan uang di Pelopor 55, yaitu koperasi berbadan hukum yang dimiliki oleh Yayasan Darul Hikmah. Pengeluaran, dilakukan oleh bendahara madrasah dicatat dalam buku catatan pengeluaran menurut jenis pengeluaran. Sebelum itu, harus melalui pengajuan APBM kepada kepala madrasah dan dilanjutkan kepada pihka yayasan untuk mendapat persetujuan permintaan pengeluaran dana yang akan dibelanjakan. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber dialokasikan sesuai kebutuhan dan dipergunakan secara efektif dan efisien.

3. Evaluasi Keuangan Pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara

Evaluasi keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara dijabarkan sebagai berikut:

a. Bentuk Evaluasi

Berkenaan dengan evaluasi keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, mengatakan bahwa:

“Pihak yang melakukan evaluasi keuangan adalah kepala sekolah dan pengurus yayasan. Ada evaluator dari eksternal madrasah, yaitu dari Kemenag Kabupaten Jepara, berkenaan dengan dana BOS, juga ada dari BPK mengenai evaluasi keuangan pembangunan. Evaluasi dilakukan satu bulan sekali, dan setahun sekali.”²¹¹

²¹¹ Wawancara dengan Bapak Dul Karim, S. Pd. I, Kepala Madrasah MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

Evaluasi kegiatan dilakukan dalam bentuk laporan kepada pihak evaluator.²¹² Seperti yang dipaparkan Bapak Dul Karim:

“Bentuk evaluasi berupa SPJ kepada evaluator. Setiap program kegiatan madrasah membentuk susunan panitia, lalu bertanggungjawab ke kepala madrasah, kemudian ke pengurus yayasan. Transparansi dalam keuangan yaitu dengan SPJ yang sangat rinci.”²¹³

Pak Aswad juga menjelaskan berkenaan bentuk evaluasi keuangan pendidikan bahwa:

“Bentuk evaluasi keuangan madrasah, ada yang dari tingkat madrasah, tingkat yayasan, dan di tingkat kemenag. Tergantung darimana sumber dananya. Pengawasan madrasah dari yayasan secara langsung. Transparansi keuangan sebatas kewajiban kepada evaluator.”²¹⁴

Dikatakan juga oleh Ibu Munzaroah:

“Bentuk evaluasi lha itu yang tiap bulan ada laporan dan pertahun itu. Yang melakukan evaluasi, yayasan tiap bulan dan setahun sekali. Evaluator yang diluar, kita ada audit BPK karena dapat bantuan RKB. Ada BOS yang evaluasinya persemester dari Kemenag. Bentuk dari hasil perencanaan keuangan pendidikan, di akhir tahun nanti ada laporan akhir tahun, berupa rekapan laporan perbulan yang dari APBM tadi. Didalamnya memuat RAPBM dan Realita. Ada rapat

²¹² Dokumentasi, *Laporan Pertanggung Jawaban* MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

²¹³ Wawancara dengan Bapak Dul Karim, S. Pd. I, Kepala Madrasah MI darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

²¹⁴ Wawancara dengan Bapak Aswad Addu Ali, SE., Sy., Wakamad MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

besar yayasan, dari PAUD, RA MI MTs MA Pondok di akhir tahun pembelajaran.”²¹⁵

Dari wawancara beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa bentuk evaluasi keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara berbentuk laporan kepada pihak evaluator. Laporan tersebut dievaluasi berdasarkan pihak yang mengevaluasi. Adapun pihak tersebut adalah ada dari pihak internal dan eksternal madrasah, bergantung darimana sumber pendanaan yang diterima oleh madrasah. Pihak internal, yaitu berupa pengawasan dari kepala madrasah dan yayasan.

Evaluasi dalam hal ini berupa pengawasan yang dilakukan oleh pihak evaluator. Evaluator internal dilaksanakan oleh kepala madrasah dan juga pengurus yayasan. Evaluator eksternal dilakukan oleh pemerintah, yaitu dari Kementerian Agama Kabupaten Jepara dan dari BPK karena MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara baru saja menerima bantuan RKB.

b. Waktu evaluasi

Berkenaan dengan waktu evaluasi, Ibu Munzaroah mengatakan bahwa :

“Yang melakukan evaluasi, yayasan tiap bulan dan setahun sekali. Evaluator yang diluar, kita ada audit BPK karena dapat bantuan RKB. Ada BOS yang evaluasinya

²¹⁵ Wawancara dengan Ibu Munzaroah, S.Pd.I, Bendahara MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

persemester dari Kemenag. Bentuk dari hasil perencanaan keuangan pendidikan, di akhir tahun nanti ada laporan akhir tahun, berupa rekapan laporan perbulan yang dari APBM tadi. Didalamnya memuat RAPBM dan Realita. Ada rapat besar yayasan, dari PAUD, RA MI MTs MA Pondok di akhir tahun pembelajaran.²¹⁶

Dari informan di atas bahwa evaluasi dalam bentuk laporan kepada pihak evaluator. Laporan kepada kepala madrasah dilakukan setiap bulan, yaitu bendahara melaporkan rekapan penerimaan dan pengeluaran selama satu bulan. Dari laporan-laporan perbulan selama satu tahun anggaran, kemudian di rekap menjadi laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban kepada yayasan, yaitu dengan adanya rapat besar dengan seluruh satuan pendidikan di lingkungan yayasan Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara. Selain itu, evaluator dari luar adalah dari pihak Kementerian Agama Jepara berkenaan dengan dana BOS. Pihak madrasah menyerahkan laporan kepada pemerintah sesuai dengan aturan pemerintah, dilakukan satu semester sekali.

C. Analisis Data

Dalam bab satu dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, maka dalam bab empat ini yang pertama, menganalisis bagaimana

²¹⁶ Wawancara dengan Ibu Munzaroah, S.Pd.I, Bendahara MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara, 06 November 2019.

perencanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara. Kedua, menganalisis bagaimana pelaksanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara. Ketiga, memberikan analisis terhadap bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara.

1. Analisis Perencanaan Keuangan Pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara

Perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis dan rasional untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien. Tahap awal dalam perencanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara yaitu penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran merupakan gambaran terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan yang dapat diketahui satuan biaya disetiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Anggaran di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara merupakan rencana pemasukan dan pengeluaran yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam satu tahun ke depan. Dalam penyusunan anggaran tidak lupa mengidentifikasi sumber pendapatan madrasah.

Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Mulyasa, Fungsi yang pertama ini meliputi dari mana saja sumber pendapat keuangan didapat, pengeluaran anggaran untuk kegiatan belajar

mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium, dan kesejahteraan.²¹⁷

Kemudian keterlibatan pengurus yayasan, kepala madrasah, wakil kepala madrasah dan bendahara dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM). Pengembangan RAPBM ini berupa adanya tim yang bertujuan menentukan program kegiatan apa saja satu tahun ke depan. Setelah itu mendapatkan pengesahan dari kepala madrasah seperti yang ada di dokumentasi RAPBM MI Darul Hikmah. Usulan biaya sesuai dengan rencana kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang. Tentunya, dalam perencanaan keuangan dilandasi dengan kebutuhan dan skala prioritas madrasah sesuai dengan standar pendidikan dan berdasarkan atas realisasi dari kegiatan dan anggaran madrasah sebelumnya. Setelah itu dilakukan sosialisasi dan legalitas kepada *stakeholder*.

2. Analisis Pelaksanaan Keuangan Pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara

Pelaksanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara mencakup kegiatan penerimaan dan pengeluaran. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan keuangan pendidikan adalah sebagai berikut:

Penerimaan berkaitan dengan sumber dana yang didapatkan oleh madrasah. Setiap dana yang diterima, direkap oleh

²¹⁷ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 198-200.

bendahara madrasah untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. MI Darul Hikmah sendiri biasanya menyimpan uang di Pelopor 55, yaitu koperasi berbadan hukum yang dimiliki oleh Yayasan Darul Hikmah.

Pengeluaran, dilakukan oleh bendahara madrasah dicatat dalam buku catatan pengeluaran menurut jenis pengeluaran. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber dialokasikan untuk biaya rutin dan non rutin madrasah, biaya operasional madrasah. Dana yang diperoleh MI Darul Hikmah dari berbagai sumber perlu dipergunakan secara efektif dan efisien.

Beberapa hal yang dilakukan bendahara dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah, telah sesuai dengan pernyataan Mustari yaitu, a) Bendahara sekolah wajib menyelenggarakan penatausahaan seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, b) Bendahara sekolah wajib menutup buku kas umum sertiap akhir bulan dan diketahui oleh kepala sekolah, c) Semua penerimaan harus dicatat dalam buku kas umum, d) Selain dicatat pada kas umum, semua penerimaan dicatat dalam buku bantu penerimaan sesuai dengan jenis sumber dayanya e) Penyetoran dicatat dalam buku bantu bank, f) Bendahara sekolah wajib mempertanggungjawabkan.²¹⁸

²¹⁸ Muhamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, (Jaharta RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 194.

Kemudian, dalam hal sumber dana pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara bersumber dari pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah dan bersumber dari *Syahriyyah* siswa kelas *Tahfizh* saja. Hal ini kurang maksimal dikarenakan dalam sumber pembiayaan pendidikan tidak hanya bersumber seperti di atas. Maka dari itu kurang sesuai dengan pendapat yang dijelaskan oleh Mustari bahwa sumber-sumber keuangan sekolah bisa dari masyarakat, alumni, kegiatan wirausaha sekolah dan lainnya.²¹⁹

3. Analisis Evaluasi Keuangan Pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara

Evaluasi keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara merupakan kegiatan setelah perencanaan dan pelaksanaan. Berkenaan dengan evaluasi tersebut, di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara dilakukan melalui pengawasan dan pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pengawasan dilakukan oleh pihak evaluator, yaitu oleh pihak internal dan eksternal madrasah. Bergantung darimana sumber pendanaan yang diterima oleh madrasah. Hal ini dilakukan guna untuk mengawasi proses pelaksanaan dan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, demi menghindari penyelewengan. Perihal waktu pelaksanaan

²¹⁹ Mustari, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 173-174.

evaluasi di MI Darul Hikmah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dari pihak evaluator.

Hal ini selaras dengan Mustari terkait dengan jenis pengawasan berdasarkan subjeknya, yaitu ada pengawasan intern dan ekstern madrasah. Kemudian berdasarkan waktu, di MI Darul Hikmah menganut pengawasan berkala yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu berdasarkan rencana.²²⁰

Kemudian pertanggungjawaban terhadap pihak yang berkepentingan yaitu berupa pelaporan. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Tim Administrasi Pendidikan UPI, bahwa pertanggungjawaban ini berkaitan dengan pembuatan laporan yang dipertanggungjawabkan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi *stakeholder* lembaga pendidikan.²²¹

4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dapat dikatakan jauh dari kata sempurna. Setidaknya hasil penelitian ini dapat diambil manfaatnya dan dijadikan referensi untuk dikembangkan ke arah yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa keterbatasan dalam memperoleh data dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan Kemampuan. Suatu penelitian tidak lepas dari pengetahuan. Disadari bahwa peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan khususnya dalam hal mengkaji dan menelaah masalah

²²⁰ Mustari, *Manajemen...*, hlm. 202-203.

²²¹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan...*, hlm. 269.

yang diangkat dalam penelitian, sehingga memengaruhi proses dan hasil penelitian. Namun peneliti sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan penelitian ini sesuai dengan arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing.

2. Keterbatasan Tempat. Tempat yang menjadi objek penelitian hanya dilakukan di MI Darul Hkmah Menganti Kedung Jeparu saja, sehingga apabila diterapkan di sekolah/ madrasah lain akan berbeda pula hasilnya.
3. Keterbatasan Waktu. Penelitian ini hanya dilakukan pada saat penelitian skripsi saja, sehingga dari waktu yang singkat tersebut juga memengaruhi hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang manajemen keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan keuangan pendidikan dilaksanakan melalui tahap pembuatan rencana anggaran dimulai dari penyusunan anggaran, yaitu dimulai dengan identifikasi dan analisis kebutuhan dan penyusunan anggaran yang melibatkan *stakeholder*, dilakukan pada sebelum awal tahun pelajaran, dilandasi dengan kebutuhan dan skala prioritas madrasah sesuai dengan standar pendidikan dan berdasarkan atas realisasi dari kegiatan dan anggaran madrasah sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah identifikasi sumber, yaitu dari pemerintah berupa dana BOS dan SPP dari kelas *Tahfizh*. Kemudian, dikembangkan dan diajukan kepada pihak madrasah dan yayasan untuk disahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Pelaksanaan keuangan pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan, berkaitan dengan penerimaan sumber dana dan pembukuan. Setiap dana yang diterima, direkap oleh bendahara madrasah, dan sudah sesuai dengan prosedur penerimaan dan pembukuan. Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah sirkulasi keuangan berada di Pelopor 55, yaitu

koperasi berbadan hukum yang dimiliki oleh Yayasan Darul Hikmah. Pengeluaran, dilakukan oleh bendahara madrasah dicatat dalam buku catatan pengeluaran menurut jenis pengeluaran. Alokasi pengeluaran sesuai dengan kebutuhan madrasah dan siswa baik biaya rutin maupun non rutin. Sebelum itu, harus melalui pengajuan APBM kepada kepala madrasah dan dilanjutkan kepada pihak yayasan untuk mendapat persetujuan permintaan pengeluaran dana yang akan dibelanjakan.

3. Evaluasi keuangan pendidikan dilakukan oleh pihak internal (kepala madrasah, yayasan Darul Hikmah) dan pihak eksternal (Kementerian Agama Kabupaten Jepara). Evaluasi yang dilakukan dengan mengawasi dan melihat bukti laporan rincian pendapatan dan pengeluaran. Kegiatan evaluasi dilaksanakan satu bulan sekali (untuk ke kepala madrasah) berupa laporan bulanan, satu tahun sekali dengan adanya rapat pertanggung jawaban kepada yayasan dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban tahunan, dan satu semester sekali dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kementerian Agama mengenai dana BOS yang diterima oleh madrasah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di MI Darul hikmah Menganti Kedung Jepara berdasarkan kesimpulan di atas dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Madrasah dalam hal perencanaan keuangan sebaiknya melibatkan peran aktif orangtua dan masyarakat sebagai salah satu *stakeholder*

dalam menentukan kebijakan untuk pembiayaan madrasah. Hal tersebut dimaksudkan agar timbul transparansi dan kepercayaan lebih dari masyarakat terhadap madrasah.

2. Pelaksanaan keuangan terkait dengan sumber pendapatan keuangan madrasah bisa lebih variatif dari berbagai sumber. Tidak hanya dari pemerintah dan SPP wali murid kelas *Tahfizh*. Madrasah dapat memaksimalkan sumber dana lain, bisa dengan membentuk wirausaha madrasah, bazar, sumbangan dari orang tua siswa yang tidak terikat dan jenis lainnya agar bisa lebih mendapatkan sokongan sumber dana.
3. Untuk evaluasi keuangan madrasah dalam pengawasan dan pelaporan sudah sesuai antara pemberi dana dan pertanggungjawabannya, hanya saja lebih ditingkatkan kembali dan pihak evaluator selalu memberikan saran ketika pengawasan.

C. Penutup

Seglaa puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia dan cinta kasih-Nya, peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. Selain itu, penulis juga berharap melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam keilmuan manajemen keuangan pendidikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul Aziz dan Muhammad Sya'ban Al-Hafizh (Ed.). *An-Nisa': Al-Qur'an for Ladies & Fiqih Wanita*. Bekasi: Surprise Production. 2012.
- Ariska, Neng. "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Yayasan Darul Inayah Cisarua Bandung Barat", *Skripsi* (Semarang: Program Sarjana UIN Walisongo, 2018).
- Aziz, Muhammad Zaki. "Impelementasi Manajemen Keuangan Pendidikan di Rumah Gemilang Indonesia Sawangan Depok", *Skripsi* (Jakarta: Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2018).
- Budaya, Budi. "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Yang Efektif". *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Vol. 18, No. 1.
- Chairunnisa, Connie. *Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2010.
- Djaelani, Nurfaedah. "Analisis Pengelolaan Dana Pendidikan di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa (Studi Kasus: Program Pendidikan Sekolah SMART Ekselensia Indonesia)", *Skripsi* (Jakarta: Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2018).
- Effendi, Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Fahrurrozi, "Manajemen Keuangan Madrasah". *Jurnal Walisongo*. Vol. 17, No. 2, tahun 2012.
- Fahrurrozi. *Manajemen Pendidikan Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Fattah, Nanang. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Hidayat, Rahmat dan H. Candra Wijaya. *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan: LPPPI. 2017.
- Hovart, Tatjana. “Leader Accountability for School Financial Management” (*Annual World [International Congress for Effectiveness and Improvement] ICSEI*).
- Kurniawan, Arie Wibowo. dkk. *Manajemen Keuangan SMK*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud. tt.
- Machali, Imam dan Ara Hidayat. *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/ Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2008.
- Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Manzilati, Asri. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press. 2017.
- Mohsin, Magda Ismail Abdel. Financing Through Cash-Waqf: A Revitalization to Finance Different Needs. *Internattional Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 6, No. 4, tahun 2013.
- Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.

- Mulyasa, E. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Mustari, Muhamad. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2015.
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016.
- Obgonnaya, Nelson, dkk. *Budgeting and Financial Management in Education*. Lagos: Noun Press. 2017.
- P., Ferdi W., “Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis”. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 19, No. 4, tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005, *Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008, *Pendanaan Pendidikan*.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung, Alfabeta. 2012.
- Robbin, Stephen P. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Sabarguna, Haji Boy S. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi. 2010.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono, Apri Nuryanto (Ed.). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. 2016.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsaputra, Uhar. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama. 2013.
- Swartz, Leslie. *Financial Management of Schools*. Texas: Connexions. 2009.
- Tampubolon, Manahan. *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan (Education and Finance Plan)*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 46, ayat (1).
- Usman, Ainul Mardiyah, dkk, “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh”, *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 5, no. 4, 2017.
- Zulfa, Umi. “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat: Analisis School Levy”. *Jurnal*. Vol. XVII No. 2, 2012.

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari, Tanggal : Rabu, 06 November 2019

Informan : Dul Karim, S.Pd.I

Jabatan : Kepala Madrasah

Tempat : Ruang Tamu Madrasah

Waktu : 10.03 WIB – Selesai

1. Peneliti : Bagaimana perencanaan keuangan di MI Darul Hikmah, pak?
Informan : Perencanaan merupakan suatu proses awal dalam keuangan madrasah, meliputi salah satunya adalah sumber dana. Di MI Darul Hikmah Menganti Kedung Jepara adalah dari BOS.
2. Peneliti : Bagaimana sistem perencanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah?
Informan : Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan identifikasi kebutuhan kemudian membuat anggaran. Anggaran tersebut nantinya diajukan ke pengurus (yayasan). Setelah pengajuan anggaran akan diketahui diterima atau tidaknya ajuan anggaran tersebut.
3. Peneliti : Kapan dilakukan perencanaan keuangan madrasah?
Informan : Waktu penrencanaan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu di awal tahun ajaran baru, dan satu bulan sekali.
4. Peneliti : Darimana saja sumber keuangan madrasah?
Informan : Sumber dana diperoleh dari BOS, *Syahriyyah* (SPP) dari siswa program Kelas *Tahfizh*. BOS dari pemerintah. *Syahriyyah* atau sumbangan orang tua wali hanya dibebankan di kelas yang program *Tahfidz* sebesar Rp. 100.000 perbulan.
5. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan anggaran, pak?
Informan : Yang terlibat dalam penyusunan anggaran atau dalam hal ini adalah perencanaan keuangan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan pengurus yayasan.
6. Peneliti : Pedoman apa yang digunakan dalam perencanaan

- keuangan madrasah?
- Informan : Pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan keuangan adalah analisis kebutuhan dengan skala prioritas, di *list* apa saja, baru kemudian di ajukan ke pengurus yayasan tadi. Dengan kata lain, pertimbangan dalam perencanaan adalah atas dasar analisis kebutuhan.
7. Peneliti : Apa bentuk dari hasil perencanaan keuangan madrasah, pak?
- Informan : Hasil dari *acc* pengurus, dibelanjakan sesuai dengan apa yang disetujui oleh pengurus.
8. Peneliti : Adakah kendala yang dihadapi? Apa saja pak?
- Informan : Kendala yang dihadapi, diantaranya ketika dana BOS belum cair, sedangkan ada kebutuhan yang mendesak madrasah harus mencari alternatif yaitu *supplay* dari yayasan.
9. Peneliti : Bagaimana evaluasi keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah ini, pak?
- Informan : Evaluasi, yaitu kesesuaian antara pendapatan dan pengeluaran madrasah. Sudah sesuai apa belum.
10. Peneliti : Siapa sajakah pihak yang melakukan evaluasi keuangan pendidikan?
- Informan : Pihak yang melakukan evaluasi keuangan adalah kepala sekolah dan pengurus yayasan.
11. Peneliti : Adakah evaluator dari luar madrasah, pak?
- Informan : Ada evaluator dari eksternal madrasah, yaitu dari Kemenag Kabupaten Jepara, berkenaan dengan dana BOS, juga ada dari BPK mengenai evaluasi keuangan pembangunan.
12. Peneliti : Kapan waktu dilaksanakannya evaluasi keuangan pendidikan?
- Informan : Evaluasi dilakukan satu bulan sekali, dan setahun sekali.
13. Peneliti : Bagaimana bentuk evaluasi keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah, pak?
- Informan : Bentuk evaluasi berupa SPJ kepada evaluator
14. Peneliti : Adakah penanggung jawab disetiap kegiatan yang telah disusun dalam RKAM?
- Informan : Setiap program kegiatan madrasah membentuk susunan panitia, lalu bertanggungjawab ke kepala madrasah, kemudian ke pengurus yayasan
15. Peneliti : Seperti apa bentuk transparansi laporan keuangan di MI Darul Hikmah ini pak?

Informan : Transparansi dalam keuangan yaitu dengan SPJ yang sangat rinci

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari, Tanggal : Rabu, 06 November 2019
Informan : Aswad Addu Ali Humad Al Alim, SE.Sy.
Jabatan : Wakil Kepala Madrasah
Tempat : Ruang Tamu Madrasah
Waktu : 10.55 WIB – Selesai

1. Peneliti : Bagaimana perencanaan keuangan di MI Darul Hikmah, pak?
Informan : Perencanaan keuangan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yang berkaitan tentang pembiayaan-pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan
2. Peneliti : Pedoman yang digunakan dalam melakukan perencanaan keuangan di MI Darul Hikmah, apa saja pak?
Informan : Tolok ukur perencanaan keuangan, dalam hal ini adalah program kegiatan mengacu pada tahun ajaran yang lalu.
3. Peneliti : Kapan dilaksanakannya proses perencanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah pak?
Informan : Waktu pelaksanaan pada awal ajaran baru, dengan rincian berbagai kegiatan, baik program tahunan, bulanan, dan lainnya.
4. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan ini?
Informan : Yang terlibat dalam perencanaan keuangan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan wakil guru.
5. Peneliti : Bagaimana proses dari perencanaan keuangan itu sendiri di MI Darul Hikmah pak?
Informan : Proses perencanaan yang dilakukan adalah masing-masing elemen menganalisis kebutuhan dari berbagai program, kemudian dipadukan. Lalu, disetorkan kepada saya (wakil kepala) baru ke

- bendahara madrasah dengan tujuan agar terukur.
6. Peneliti : Adakah kendala yang dihadapi, pak? Kalau ada, apa saja?
Informan : Kendala yang dihadapi adalah dari tahun ke tahun kan jumlah siswa berubah-ubah, ya kondisi demografi istilahnya. Maka dari itu harus ada penyesuaian dalam penyusunan anggaran.
7. Peneliti : Bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut?
Informan : Untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan perkiraan, dan masukan dari guru-guru.
8. Peneliti : Bagaimana pelaksanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah, pak?
Informan : Pelaksanaan keuangan pendidikan yaitu proses eksekusi dari kegiatan yang telah direncanakan.
9. Peneliti : Darimana saja sumber keuangan di MI Darul Hikmah pak?
Informan : Sumbernya dari BOS, SPP, Anggaran non APBM
10. Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan keuangan di MI Darul Hikmah ini pak?
Informan : Pengeluaran tidak secara keseluruhan sama dengan pendapatan. Karena ditengah jalan ada hal-hal yang tidak ada di perencanaan. Tidak sampai defisit, padahal yang diinginkan surplus.
11. Peneliti : Bagaimana evaluasi keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah pak?
Informan : Bentuk evaluasi keuangan madrasah, ada yang dari tingkat madrasah, tingkat yayasan, dan di tingkat kemenag. Tergantung darimana sumber dananya.
12. Peneliti : Adakah evaluator eksternal, pak?
Informan : Evaluator dari luar yaitu seperti di atas, yaitu kepala sekolah, yayasan dan Kemenag.
13. Peneliti : Seperti apa bentuk transparansi laporan keuangan di MI Darul Hikmah, pak?
Informan : Transparansi keuangan sebatas kewajiban kepada evaluator. Kepada masyarakat secara umum tidak secara buka-bukaan.

14. Peneliti : Bagaimana pengawasan dari kepala madrasah terhadap keuangan madrasah, pak?
Informan : Pengawasan madrasah dari yayasan secara langsung
15. Peneliti : Apakah pihak madrasah membentuk penanggung jawab disetiap program kegiatan yang telah tercantum di RAPBM, pak?
Informan : Secara umum, hanya ada program kegiatan terlebih dahulu. Baru ketika akan kegiatan baru dibentuk siapa saja yang bertanggung jawab setiap kegiatan Yang bertanggung jawab ya itu tadi dari susunan kepanitiaan yang sudah dibentuk.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari, Tanggal : Rabu, 06 November 2019
Informan : Munzaroah, S.Pd.
Jabatan : Bendahara Madrasah
Tempat : Ruang Tamu Madrasah
Waktu : 10.26 WIB - Selesai

1. Peneliti : Bagaimana sistem perencanaan keuangan di MI Darul Hikmah, bu?
Informan : Sistem perencanaan keuangan, yaitu dengan menyusun RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) dimana penyusunan RKAM melibatkan komite, guru-guru, jika mempunyai pendapat bisa ditampung.
2. Peneliti : Kapan dilaksanakannya proses perencanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah, bu?
Informan : Penyusunan RKAM dilaksanakan awal tahun pelajaran dengan rapat.
3. Peneliti : Sistem perencanaan keuangan di MI Darul Hikmah bagaimana bu?
Informan : Di yayasan ada uang disentral yang ada dibawah yayasan bernama Pelopor 55 yang murni mengelola keuangan yayasan, salah satunya adalah MI, sepengetahuan yayasan. Penerimaan nanti disetorkan, atas ajuan APBM pengambilannya, di acc atau tidak ya tergantung yayasan. Dilksanakannya RAPBM adalah awal tahun pelajaran.
4. Peneliti : Pihak yang terlibat dalam perencanaan keuangan siapa saja, bu?
Informan : Yang terlibat ya kepala sekolah, bendahara, yayasan.
5. Peneliti : Pedoman dalam pelaksanaan perencanaan keuangan di MI Darul Hikmah seperti apa bu?
Informan : Pedoman dalam perencanaan keuangan, kalau

BOS ada juknis / RKAM. Kemudian di yayasan ada pedoman dari RAPBM dijadikan sebagai juknis. Jika ada tambahan atau revisi anggaran, dikonsultasikan ke yayasan. Kemudian dana yang dapat disetorkan ke Pelopor 55, yaitu merupakan koperasi berbadan hukum dibawah naungan yayasan.

6. Peneliti : Bentuk dari hasil perencanaan keuangan pendidikan di MI darul Hikmah seperti apa bu?
Informan : Bentuk dari hasil perencanaan keuangan pendidikan, di akhir tahun nanti ada laporan akhir tahun, berupa rekap laporan perbulan yang dari APBM tadi. Didalamnya memuat RAPBM dan Realita. Ada rapat besar yayasan, dari PAUD, RA MI MTs MA Pondok di akhir tahun pembelajaran.
7. Peneliti : Pertimbangan dalam penyusunan anggaran di MI darul Hikmah bagaimana bu?
Informan : Pertimbangan dalam penyusunan perencanaan adalah realita dari tahun pembelajaran tahun lalu.
8. Peneliti : Kendala yang dihadapi apa saja bu?
Informan : Kendala yang dihadapi tidak terlalu ya.
9. Peneliti : Pelaksanaan keuangan pendidikan di MI Darul Hikmah seperti apa bu?
Informan : Pelaksanaan keuangan madrasah adalah kita menjalankan keuangan sesuai RAPBM, dan RAPBM dijadiakan rambu-rambu atau pedoman dalam berjalan.
10. Peneliti : Kapan dilaksanakannya, bu?
Informan : Waktu pelaksanaan sesuai dengan tahun ajaran tadi to.
11. Peneliti : Sumber keuangan madrasah dari mana saja bu?
Informan : BOS, Iuran Tahfidz. Karena yang reguler kan gratis.
12. Peneliti : Bagaimana prosedur penerimaan pengelolaan keuangan di MI darul Hikmah bu?
Informan : Prosedur penerimaan, kalau BOS, lewat rekening MI, diambil bendahara dan kepala dan langsung

disetorkan ke pelopor 55. Iuran Tahfidz berasal dari wali murid yang dari kelas Tahfidz disetorkan ke wali kelas, kemudian dari wali kelas ke bendahara instansi, lalu ke bendahara pelopor 55.

13. Peneliti : Bagaimana pembukuan di madrasah bu?
Informan : Pembukuan dalam penerimaan jelas ada
14. Peneliti : Apakah pengeluaran sesuai dengan program madrasah bu?
Informan : Pengeluaran sesuai program madrasah diusahakan sesuai. Jika ada sesuatu diluar APBM, ya dikonsulkan ke yayasan
15. Peneliti : Bagaimanakah tugas bendahara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan madrasah bu?
Informan : Tugasnya ya sangat berat. Menerima dan mengeluarkan uang sesuai dengan yang diajukan dan di acc.
16. Peneliti : Bentuk evaluasi keuangan pendidikan di MI darul Hikmah bagaimana bu?
Informan : Bentuk evaluasi lha itu yang tiap bulan ada laporan dan pertahun itu.
17. Peneliti : Siapa yang melakukan evaluasi bu?
Informan : Yang melakukan evaluasi, yayasan tiap bulan dan setahun sekali.
18. Peneliti : Apakah ada evaluator eksternal mamadrasah bu?
Informan : Evaluator yang diluar, kita ada audit BPK karena dapat bantuan RKB. Ada BOS yang evaluasinya persemester dari Kemenag.
19. Peneliti : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan di MI Darul hikmah bu?
Informan : Bentuk pertanggung jawabannya adalah laporan.

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
2	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
3	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
4	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
5	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
6	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
7	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
8	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
9	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
10	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
11	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
12	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
13	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
14	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
15	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
16	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
17	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
18	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
19	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
20	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
21	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
22	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
23	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
24	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
25	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
26	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
27	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
28	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
29	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
30	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
31	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
32	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
33	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
34	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
35	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
36	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
37	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
38	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
39	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
40	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
41	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
42	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
43	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
44	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
45	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
46	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
47	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
48	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
49	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
50	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
51	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
52	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
53	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
54	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
55	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
56	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
57	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
58	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
59	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
60	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
61	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
62	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
63	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
64	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
65	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
66	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
67	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
68	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
69	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
70	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
71	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
72	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
73	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
74	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
75	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
76	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
77	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
78	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
79	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
80	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
81	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
82	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
83	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
84	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
85	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
86	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
87	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
88	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
89	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
90	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
91	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
92	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
93	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
94	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
95	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
96	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
97	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
98	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000
99	Saldo Awal	1.000.000	1.000.000
100	Saldo Akhir	1.000.000	1.000.000

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
(BOS 1 AGENSI)
TAHUN ANGGARAN 2016



PERIODE : SEMESTER II
BULAN : JULI S/D DESEMBER 2016

MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL HIKMAH
MENGANTI KEDUNG JEPARA
Jl. Masjid - Pasigondri No. 99 Bn. 01 Bandung Utara
 401 361 21914307 e-mail : madrasahibtdarulhikmah@gmail.com


REKAPITULASI PERKIRAAN BIAYA (RAB) PROJEK

REKONSTRUKSI DAN PERAWATAN JALAN


DI WILAYAH KERJA (WAK) ...

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah	Unit Price	Jumlah	Uraian Pekerjaan	Satuan	Jumlah	Unit Price	Jumlah	
1. Pekerjaan Persiapan											
1.1	Persiapan Lapangan Kerja	m ²	1000	10000	10000000	1.2	Persiapan Lapangan Kerja	m ²	1000	10000	10000000
2. Pekerjaan Perbaikan Jalan											
2.1	Persiapan Pekerjaan	m ²	1000	10000	10000000	2.2	Persiapan Pekerjaan	m ²	1000	10000	10000000
3. Pekerjaan Perawatan Jalan											
3.1	Persiapan Pekerjaan	m ²	1000	10000	10000000	3.2	Persiapan Pekerjaan	m ²	1000	10000	10000000
4. Pekerjaan Lain-lain											
4.1	Persiapan Pekerjaan	m ²	1000	10000	10000000	4.2	Persiapan Pekerjaan	m ²	1000	10000	10000000
Jumlah Total											
					100000000						

5. Pekerjaan Perawatan Jalan											
5.1	Persiapan Pekerjaan	m ²	1000	10000	10000000	5.2	Persiapan Pekerjaan	m ²	1000	10000	10000000
6. Pekerjaan Lain-lain											
6.1	Persiapan Pekerjaan	m ²	1000	10000	10000000	6.2	Persiapan Pekerjaan	m ²	1000	10000	10000000
Jumlah Total											
					100000000						



Stempel Resmi



Stempel Kontraktor



REKAPITULASI DAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
TAHUN ANGGARAN 2016

Kategori	Kode	Uraian	Volume	Satuan	2015		2016	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1. Belanja Pegawai								
1.1	1.1.1	Gaji dan Tunjangan	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.2	1.2.1	Biaya Perjalanan Dinas	5	Orang	500.000	500.000	500.000	500.000
1.3	1.3.1	Biaya Kesehatan	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.4	1.4.1	Biaya Pendidikan	5	Orang	500.000	500.000	500.000	500.000
1.5	1.5.1	Biaya Pelatihan	5	Orang	500.000	500.000	500.000	500.000
1.6	1.6.1	Biaya Hibah	5	Orang	500.000	500.000	500.000	500.000
1.7	1.7.1	Biaya Lain-lain	5	Orang	500.000	500.000	500.000	500.000
1.8. 2015-2016								
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Belanja Operasional								
2.1	2.1.1	Biaya Bahan Baku	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.2	2.2.1	Biaya Bahan Baku	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.3	2.3.1	Biaya Bahan Baku	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.4	2.4.1	Biaya Bahan Baku	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.5	2.5.1	Biaya Bahan Baku	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.6	2.6.1	Biaya Bahan Baku	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.7	2.7.1	Biaya Bahan Baku	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.8	2.8.1	Biaya Bahan Baku	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.9	2.9.1	Biaya Bahan Baku	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.10	2.10.1	Biaya Bahan Baku	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.11. 2015-2016								
					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3. Belanja Modal								
3.1	3.1.1	Belanja Modal	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.2	3.2.1	Belanja Modal	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.3	3.3.1	Belanja Modal	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.4	3.4.1	Belanja Modal	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.5	3.5.1	Belanja Modal	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.6	3.6.1	Belanja Modal	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.7	3.7.1	Belanja Modal	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.8	3.8.1	Belanja Modal	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.9	3.9.1	Belanja Modal	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.10	3.10.1	Belanja Modal	10	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.11. 2015-2016								
					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Jumlah								
					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

REKAPITULASI DATA KEUANGAN PERUSAHAAN

PERUSAHAAN MANULAK

NO	URUTAN	DESKRIPSI	2019	2020	2021
A. Aset					
1	1	Aset Lancar	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	2	Aset Tidak Lancar	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	3	Aset Lainnya	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4	4	Total Aset	6.000.000	6.000.000	6.000.000
B. Liabilitas					
5	5	Liabilitas Lancar	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6	6	Liabilitas Tidak Lancar	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	7	Liabilitas Lainnya	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	8	Total Liabilitas	6.000.000	6.000.000	6.000.000
C. Ekuitas					
9	9	Ekuitas	0	0	0
10	10	Total Ekuitas	0	0	0
11	11	Total	6.000.000	6.000.000	6.000.000

NO	URUTAN	DESKRIPSI	2019	2020	2021
A. Aset					
1	1	Aset Lancar	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	2	Aset Tidak Lancar	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	3	Aset Lainnya	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4	4	Total Aset	6.000.000	6.000.000	6.000.000
B. Liabilitas					
5	5	Liabilitas Lancar	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6	6	Liabilitas Tidak Lancar	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	7	Liabilitas Lainnya	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	8	Total Liabilitas	6.000.000	6.000.000	6.000.000
C. Ekuitas					
9	9	Ekuitas	0	0	0
10	10	Total Ekuitas	0	0	0
11	11	Total	6.000.000	6.000.000	6.000.000




REKAPITULASI DATA PERUSAHAAN
PERIODE 2011-2012

Nama Perusahaan: **PT. BUKIT BARU BUKIT BARU**
 Alamat: **Jl. Raya Bukit Baru, Bukit Baru, Kabupaten Bukit Baru, Sumatera Selatan**
 No. Telp: **0371-411111**
 No. Fax: **0371-411111**
 No. Email: **info@bukitbaru.com**

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
2	Saldo Akhir	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000

REKAPITULASI DATA PERUSAHAAN
PERIODE 2011-2012

Nama Perusahaan: **PT. BUKIT BARU BUKIT BARU**
 Alamat: **Jl. Raya Bukit Baru, Bukit Baru, Kabupaten Bukit Baru, Sumatera Selatan**
 No. Telp: **0371-411111**
 No. Fax: **0371-411111**
 No. Email: **info@bukitbaru.com**

No	Tanggal	No. Buk	No. Mut	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
1	2011-01-01			Saldo Awal	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
2	2011-01-01			Saldo Akhir	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000

DAFTAR PENERBITAN KARTASIA

KARTASIA

Jember, 2011

No	Kategori	No. Buku	No. Judul	Jenis	Jumlah Ril	Jumlah Ril	Nilai
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

No	Kategori	No. Buku	No. Judul	Jenis	Jumlah Ril	Jumlah Ril	Nilai
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							



Petugas Pelopor 55 dalam Penerimaan Keuangan



Penyerahan Penerimaan Keuangan Oleh Bendahara



Wawancara dengan Bendahara Madrasah

Lampiran 3

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Prof. Dr. H. M. H. H. Ngaliun, Telp. 7601291 Fax. 7613367, Semarang 50132

Nomor: B.4188/Uh.10.3/D.1/TL.00/11/2019

Semarang, 04 November 2019

Lamp :-

Hal : **Mohon Izin Riset**

A.n. : Anis Khumaidah

NIM : 1503036007

Kepada

Kepala MI Darul Hikmah Menganti Kedung
di Jepara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat dalam rangka penulisan skripsi, bersama ini kami
hadapkan mahasiswa :

Nama : Anis Khumaidah
NIM : 1503036007
Alamat : Desa Senenon 20/07, Kecamatan Tahunan, Kab. Jepara
Judul Skripsi : MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN DI
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DARUL HIKMAH
MENGANTI KEDUNG
Pembimbing : 1. Dr. Fahrurrozi, M.Ag.
2. Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag.

Bahwa mahasiswa tersebut membutuhkan data-data dengan tema/judul skripsi yang
sedang disutusnya, oleh karena itu kami mohon diberi izin melaksanakan riset selama
kurang lebih satu bulan, mulai tanggal 06 sampai dengan 30 November 2019.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang

RIWAYAT HIDUP

D. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anis Khumaidah
2. Tempat & Tanggal Lahir : Jepara, 21 April 1997
3. Alamat Rumah : Senenan RT 020 RW 007
Kec. Tahunan Kab. Jepara
4. No. HP : 085647090437
5. Email : aniskhumaidah97@gmail.com

E. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. RA Al-Islam Senenan
2. MI Al-Islam Senenan
3. MTs NU Banat Kudus
4. MAN 2 Kudus
5. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal:

1. TPQ Al-Ikhlas Senenan Tahunan Jepara
2. Pondok Pesantren Asy'ariyah Sucen Kudus
3. Ma'ahad Al-Jami'ah Walisongo Semarang

Semarang, 16 Maret 2020



Anis Khumaidah
1503036007